

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
20 Karanganom	2	1	-	55	4	325
21 Tulung	1	3	-	78	17	593
22 Jatinom	2	2	-	189	16	805
23 Kemalang	2	1	-	80	83	1634
24 Klaten Selatan	1	-	-	36	-	0
25 Klaten Tengah	7	-	-	535	106	1.083
26 Klaten Utara	4	-	-	65	8	31
Jumlah 2017	49	33	1	5.859	922	17.981
2016	50	41	2	2.993	791	11.293
2015	49	48	2	3.655	1.823	11.189
2014	49	48	2	2.884	790	13.749
2013	48	54	1	2.595	862	13.415

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2018

C. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 KWH terjual sudah mencapai 600.177.101 Kwh, dan 2.209.751 Kvarh. Gambaran selengkapnya terlihat pada Tabel 2.117

Tabel 2.117 KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2015

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2015	159.682.405	710.528	132.982.842	195.264	234.886.147	1.160.923	72.625.707	143.036
2014	154.481.066	479.800	130.131.858	135.712	222.424.785	1.420.765	68.882.418	214.629
2013	145.477.079	592.698	120.070.726	49.141	205.095.237	631.249	62.244.093	82.001
2012	135.474.329	483.506	118.246.829	54.937	185.073.854	120.729	58.323.388	11.982
2011	124.677.127	448.968	110.498.196	55.651	169.563.614	144.562	53.866.330	1.179

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

D. Jaringan Air Bersih

Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2011 sebesar 9.872.088 m³, dan pada tahun 2015 sudah mencapai 11.678.870 m³. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.118

Tabel 2.118 Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Tahun	Jumlah Sumber	Jumlah Pelanggan	Kapasitas Produksi	Air yang Didistribusikan	Air yang Terjual	Air yang Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	16	37.941	11.678.870	10.983.558	8.473.591	2.509.967
2014	16	37.071	11.711.094	11.257.296	7.909.837	3.347.154
2013	16	34.933	10.366.903	10.216.812	7.486.919	2.729.893
2012	16	32.449	10.066.160	9.914.382	7.214.415	2.699.967
2011	16	30.814	9.872.088	9.687.483	6.969.519	2.717.964

Sumber: PDAM Kabupaten Klaten, 2016

Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat.

E. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sepanjang 777 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan

tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada dapat dilihat pada Tabel 2.119

Tabel 2.119 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (Km)

Keadaan	Status Jalan											
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten					
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2			3			4					
I Jenis Permukaan												
a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	754	754	753,94	753,94	753,94	
b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	3,16	3,16	3,16	
c. Hotmix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	21,37	21,37	12,53	12,53	12,53	
f. Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah - I	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	777	777	769,63	769,63	769,63	
II Kondisi Jalan												
a. Baik	3,9	3,9	3,9	25,76	25,76	25,76	344,42	550,57	381,08	432,91	470,61	
b. Sedang	29,62	29,62	29,62	15,61	15,61	15,61	213,52	86,63	206,61	190,92	169,03	
c. Rusak	-	-	-	-	-	-	86,63	-	68	63,51	62,9	
d. Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	132,44	132,44	113,94	82,29	67,09	
Jumlah - II	33,52	33,52	33,52	41,37	41,37	41,37	777	769,64	769,63	769,63	769,63	
III Kelas Jalan												
a.Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.Kelas III	-	-	-	41.360	41.360	41.360	-	-	-	-	-	
d.Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
e.Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f.Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	777	777	769,63	769,63	769,63	
g.Kelas IV	-	-	-	-	-	-	754	754	-	-	-	
h.Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	-	-	-	
Jumlah - III	33,52	33,52	33,52	41,36	41,36	41,36	777	777	769,63	769,63	769,63	

Sumber : DPU PR Kabupaten Klaten

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.50. Dari tabel tersebut dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km.

Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.120

Tabel 2.120 Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
2	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
3	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
4	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
5	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
6	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
7	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
8	Kebonarum	-	20,440	42,825	10,725
9	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	776,960	2.171,006	1.494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

F. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen, walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah, dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2.121

Tabel 2.121 Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargedde Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal atau investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*) melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Klaten.

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) diperlukan untuk

menjawab tantangan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017, tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.122

Tabel 2.122 Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal dalam Negeri			Total PMA + PMDN		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Total Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)
2013	1.460.300	18.983.900	8	-52	25.000	2	-99	19.008.900	10	-55
2014	3.090.300	40.173.900	12	112	5.744.100	1	22.876	45.918.000	13	142
2015	420.700	5.469.100	25	-86	20.598.400	5	259	26.067.500	30	-43
2016	6.372.700	82.845.100	28	1.415	62.385.300	13	203	145.230.400	41	457
2017	10.257.000	138.469.500	30	61	246.727.200	29	295	385.196.700	59	165

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2018

A. Penanaman Modal

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi, Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.123

Tabel 2.123 Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	11	1	21	12	23
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.000	100	3.959	2.861	575
3	Nilai Investasi (Rp.000)	Rp.	167.500.000	25.000.000	93.965.000	98.663.000	103.596.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Klaten, 2018

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.124

Tabel 2.124 Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	5	6	5	5	2
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.075	521	230	1.468	79
3	Nilai Investasi	(US \$)	6.700.000	12.246.600	72.629.000	76.260.450	80.073.473

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.124 tentang Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dan Tabel 2.126 tentang Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, terlihat bahwa Penanaman modal daerah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) semuanya mengalami peningkatan. Indikator perkembangan penanaman modal daerah menggunakan 3 (tiga) tolok ukur meliputi jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi (baik dalam ribu rupiah maupun US \$).

Ada beberapa hal sebagai faktor kunci terkait dengan peningkatan/perkembangan penanaman modal di sini, antara lain meliputi:

- a. Kemudahan dalam proses perijinan (kejelasan persyaratan perijinan, transparansi biaya, serta proses pengurusan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku);
- b. Adanya respon positif dari masyarakat dengan masuknya investasi ke daerah, disertai dengan suatu kesadaran masyarakat bahwa investor akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah;
- c. Upah Minimum Kerja (UMK) yang masih terjangkau juga menjadi daya tarik bagi investor, disamping dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai; dan
- d. Dukungan sarana prasarana yang semakin baik dari tahun ke tahun baik dari harga tanah yang relatif bersaing, sara infrastruktur, sarana tenaga listrik maupun ketersediaan air serta letak yang sangat strategis Kabupaten Klaten.

B. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya yang peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasar merupakan sektor utama untuk menggerakkan perekonomian, dan selama 3 (tiga) tahun jumlah pasar tidak ada perubahan. Gambaran pasar menurut jenisnya, dapat dilihat pada terlihat pada Tabel 2.125

Tabel 2.125 Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Departemen Store	1	1	1	10	21
02 Pasar Swalayan	108	118	118	757	894
03 Pasar Umum/Rakyat	81	81	81	55	57
04 Pasar Hewan	12	9	9	12	12
05 Pasar Buah	1	1	1	1	1
06 Pasar Sepeda	2	2	2	7	7
07 Pasar Ikan	0	0	0	0	0
08 Lain-Lain / Pasar Burung	4	4	4	12	12
09 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	210	217	217	872	1.006

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.125 diatas dapat diketahui bahwa sarana perdagangan yang berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah sangat bervariasi, mulai dari bentuk departemen store, pasar swalayan sampai dengan pasar klitikan. Dari tabel di atas terlihat pula bahwa pasar swalayan yang paling dominan, hampir tiap tahun selalu ada perkembangan atau bertambah.

Hal ini disebabkan karena masyarakat yang semakin bervariasi dan berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan teknologi, kondisi

iklim usaha yang kondusif di daerah, disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan pasar swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Disamping itu dari sejumlah 49 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum di revitalisasi. Sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 14 pasar yang direvitalisasi.

Kemudian dari sejumlah 2.274 unit usaha di bidang olahan pangan masih banyak yang produksinya belum memiliki PIRT. Sampai dengan tahun 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM baru dapat memfasilitasi sebanyak 39 UKM. Sehingga masih banyak UKM yang perlu mendapatkan fasilitasi untuk mendapatkan PIRT.

Selain itu sejalan dengan kebijakan penyerahan urusan kewenangan kemeteorologian dari provinsi ke kabupaten pada tahun 2017 Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kemeteorologian, sehingga diperlukan kesiapan penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia guna mendukung kelembagaan unit pengelola meteorology.

C. Perindustrian

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHK sebesar 8,6% (atau Rp.6.506.551,46juta) pada tahun 2013 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 7,50% (Rp.8.601.225,22juta).

Basis ekonomi untuk *sektor industri manufaktur* berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2016 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2013-2017 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, industri lainnya cenderung mengalami penurunan. Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster. Sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang dan Prambanan (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karangnom dan Wonosari (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karangnom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi,

Jogonalan, kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kemalang (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper.

Tabel 2.126 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
I INDUSTRI BESAR / MENENGAH					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	97	10,577	926,307,036	1,959,405,385
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	45	5,101	250,310,633	1,153,902,491
Sub Jumlah A 2017		142	15,678	1,176,617,672	3,143,307,876
2016		133	12,818	627,637,166	2,893,307,876
2015		134	12,811	627,276,505	2,891,861,945
2014		131	12,618	623,604,195	2,866,219,819
2013		130	12,606	622,984,310	2,863,370,694
II INDUSTRI KECIL					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17,598	71,628	545,760,452	2,276,256,721
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17,074	69,526	445,648,807	1,850,555,185
Sub Jumlah B 2017		34,672	141,154	991,409,259	4,126,811,906
2016		34,672	141,154	991,409,259	4,126,811,906
2015		34,666	141,126	991,211,017	4,135,983,708
2014		34,155	139,045	986,211,337	4,105,175,489
2013		34,121	138,907	985,231,008	4,101,094,798
Jumlah A + B 2017		34,814	156,832	2,168,026,931	7,270,119,782
2016		34,805	153,972	1,619,046,425	7,020,119,782
2015		34,800	153,937	1,618,487,522	7,027,845,653
2014		34,285	151,664	1,609,815,532	6,971,395,308
2013		34,251	151,513	1,608,215,318	6,964,465,492

Sumber : Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 9 unit usaha berupa PMA 2 unit dan PMDN 7 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp.548.980.506.000,-. Sedangkan untuk industri kecil pertumbuhannya relatif tetap.

Kemudian untuk industri mebel dari sejumlah 2.200 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 168 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan

SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya.

Di sisi lain dari 34.672 IKM yang memiliki daya saing pada tahun 2017 baru mencapai 4,5% meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 2,5%, sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya memperluas peluang dan pilihan maupun taraf yang telah dan akan dicapai sehingga upaya tersebut dapat diketahui secara transparan. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi (*formation*) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dan ini berarti menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten menurut standar UNDP sudah berada pada tingkat “menengah atas” di mana IPM Kabupaten Klaten sudah mencapai 73,97 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 sudah mencapai 74,25.

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.127

Tabel 2.127 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017

Indikator IPM	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Usia harapan Hidup	76,52	76,54	76,55	76,59	76,62
Angka harapan lama sekolah	12,27	12,74	12,85	12,85	12,97
Rata-rata lama sekolah	7,74	7,92	8,16	8,22	8,23
Pengeluaran Riil Per kapita (d/m Ribuan Rp)	10.962	10.965	11.178	11.227	11.369
IPM	72,42	73,19	73,81	73,97	74,25

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.127 di atas dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan, yaitu dari 72,42 pada tahun 2013, menjadi 73,19 pada tahun 2014, dan meningkat lagi menjadi sebesar 74,25 pada tahun 2017. Besaran

IPM yang meningkat (walaupun masih relatif kecil) menunjukkan terjadinya peningkatan mutu/kualitas SDM di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2017

Di Kawasan Subosukawonosraten, posisi IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2017 menempati urutan ke-4 (atau urutan 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah) setelah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.128

Tabel 2.128 Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2017

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	IPM	Peringkat Provinsi
Klaten	76,62	12,97	8,23	11.369	74,25	7
Boyolali	75,72	12,15	7,44	12.262	72,64	12
Sukoharjo	77,49	13,80	8,71	10.765	75,56	5
Wonogiri	76,00	12,44	6,68	8.765	68,66	24
Sragen	75,55	12,64	7,04	12.041	72,40	13
Karanganyar	77,31	13,65	8,50	10.722	75,22	6
Surakarta	77,06	14,51	10,38	13.986	80,85	3

Sumber: IPM Kabupaten Klaten 2017

Keterangan :

UHH: Usia Harapan Hidup

AMH: Angka Melek Huruf

MYS: *Mean Years of Schooling* (Rata-rata Lama Sekolah)

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2011 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 5.150 orang, pada Tahun 2015 menjadi 4.287 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2011 sebanyak 5.150 orang, tahun 2015 menjadi 4.596 orang.

Jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.129

Tabel 2.129 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2017												
2016	17	58	244	393	3.485	2.403	155	455	283	427	4.184	3.738
2015	12	36	304	425	3.728	2.848	220	491	332	487	4.596	4.287
2014	9	21	268	384	3.265	2.340	176	514	529	1.086	4.237	4.345
2013	9	35	402	701	4.593	3.886	483	970	1.550	2.457	7.037	8.049

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Berdasarkan ketentuan perundang–undangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam perda tersebut meliputi : kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan Realisasi Semester Pertama dan Perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia. Analisis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten dilakukan terhadap pelaksanaan APBD dan neraca daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, digambarkan berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Klaten bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang Sah (diantaranya penerimaan BLUD

RSUD Bagas Waras). Adapun perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Pendapatan Asli Daerah	115.441.420.053	177.922.415.860	190.622.670.128,45	224.197.408.481	371.718.439.306,04	36,18
1.1	Pajak Daerah	52.818.646.651	62.623.053.793	68.201.277.234,00	75.574.747.729	105.290.677.595,00	30,19
1.2	Retribusi Daerah	21.631.992.941	21.220.132.236	21.894.721.448,00	22.559.038.217	12.668.781.932,00	-5,38
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.586.865.621	6.902.381.491	7.477.951.040,00	9.025.861.668	9.742.870.570,00	19,64
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.403.914.840	87.176.848.340	93.048.720.406,45	117.037.760.867	244.016.109.209,04	60,28

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.

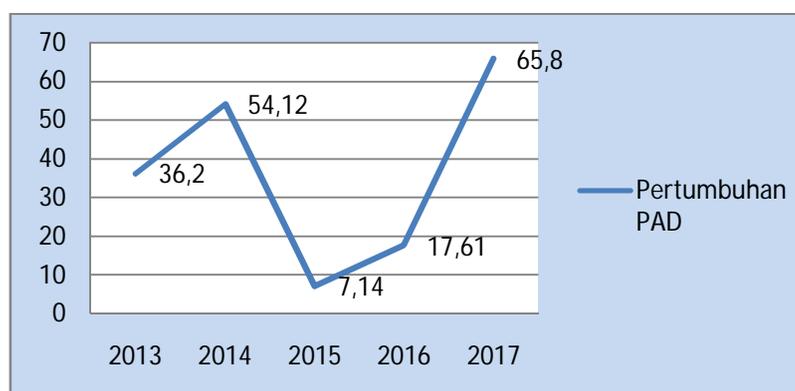
Berdasar data tersebut di atas terlihat bahwa trend pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu naik dari tahun ke tahun, akan tetapi untuk pos retribusi daerah bersifat fluktuatif. Untuk mengetahui Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

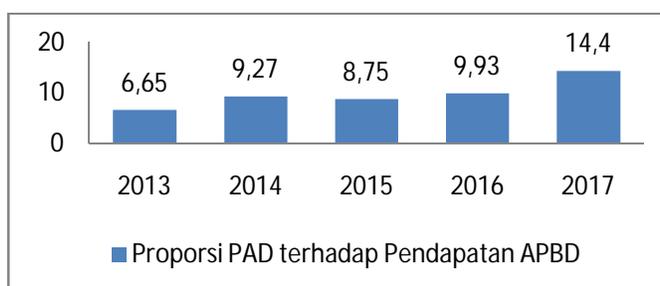
No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)*100%
01.	2013	115.441.420.053,00	1.735.589.679.346,00	6,65
02.	2014	177.922.415.860,00	1.919.961.769.290,00	9,27
03.	2015	190.622.670.128,00	2.177.820.724.857,45	8,75
04.	2016	224.197.408.481,00	2.258.604.630.605,00	9,93
05.	2017	371.718.439.306,04	2.581.515.295.917,04	14,40

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun meningkat kecuali tahun 2015 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,52%, tetapi rata-rata pertumbuhan baru mencapai angka 9,79%, meskipun di tahun 2017 sudah bisa menembus besaran hingga lebih dari 10%. Hal ini menunjukkan, bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap DAU masih sangat besar. Di lain pihak, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2013 hingga 2017 bersifat fluktuatif pada kisaran angka 36,2% - 65,4%. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya dari kontribusinya pada Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2.



Gambar 3.1 Tingkat Pertumbuhan PAD di Kab Klaten Tahun 2013– 2017 (%)



Gambar 3.2 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kab Klaten Tahun 2013 - 2017 (%)

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, namun posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, ditempu dengan mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Gambaran Postur Pendapatan Daerah selama tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
01.	2013	115.441.420.053,00	1.174.619.195.741,00	445.529.063.552,00	1.735.589.679.346,00
02.	2014	177.922.415.860,00	1.250.626.353.033,00	491.413.000.397,00	1.919.961.769.290,00
03.	2015	190.622.670.128,45	1.279.990.558.283,00	707.207.496.446,00	2.177.820.724.857,00
04.	2016	224.197.408.481,00	1.573.615.108.481,00	460.792.113.643,00	2.258.604.630.605,00
05.	2017	371.718.439.306,04	1.624.715.625.119,00	585.081.231.492,00	2.581.515.295.917,04

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.

Dari Tabel 3.3 tersebut di atas terlihat bahwa proporsi pendapatan terbesar masih mengandalkan pada dana perimbangan. Dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cenderung mengalami perkembangan yang relatif menurun. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan Pendapatan Dana BOS dan Pendapatan BLUD dimasukkan dalam Lain-lain PAD Yang Sah, yang mana nilainya relatif besar sehingga mengakibatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD menurun. Selama tahun 2013-2017 tingkat kontribusinya bersifat fluktuatif dan menurun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6) = ((3) / (4))
01.	2013	52.818.646.651,00	21.631.992.941,00	45,75
02.	2014	62.623.053.793,00	21.220.132.236,00	35,20
03.	2015	68.201.277.234,00	21.894.721.448,00	35,78
04.	2016	75.574.747.729,00	22.559.038.217,00	33,71
05.	2017	105.290.677.595,00	371.718.439.306,04	28,33

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2017, yang diambil dari data Realisasi Anggaran.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB, dengan munculnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi Pajak Daerah. Untuk Kabupaten Klaten BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011, sedangkan PBB P2 mulai tahun 2013.

Proporsi dana perimbangan terhadap Pendapatan APBD relatif besar, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	1.174.619.195.741,00	1.735.589.679.346,00	67,68
02.	2014	1.250.626.353.033,00	1.919.961.769.290,00	65,14
03.	2015	1.279.990.558.283,00	2.177.820.724.857,00	58,77
04.	2016	1.573.615.108.481,00	2.258.604.630.605,00	69,67
05.	2017	1.624.715.625.119,00	2.581.515.295.917,04	62,94

Sumber: *Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.*

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Klaten bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah, (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, (iii) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (v) Penerimaan Lainnyadan (vi) Dana Desa.

Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Klaten relatif kecil dibanding dengan dana perimbangan, namun sangat menunjang kemampuan pendanaan APBD. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/ kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi lain-lain

pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Klaten, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	445.529.063.552,00	1.735.589.679.346,00	25,67
02.	2014	491.413.000.397,00	1.919.961.769.290,00	25,59
03.	2015	707.207.496.446,00	2.177.820.724.857,00	32,47
04.	2016	460.792.113.643,00	2.258.604.630.605,00	20,40
05.	2017	585.081.231.492,00	2.581.515.295.917,04	22,66

Sumber: *Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.*

Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Perkembangan Dan Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	
1	2					7	8	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN DAERAH											
1.1	Pendapatan Asli Daerah	115.441.420.053	OT	177.922.415.860	OT	190.622.670.128,45	OT	224.197.408.481	OT	371.718.439.306,04	OT	28,68
1.1.1	Pajak Daerah	52.818.646.651	OT	62.623.053.793	OT	68.201.277.234,00	OT	75.574.747.729	OT	105.290.677.595,00	OT	27,16
1.1.2	Retribusi Daerah	21.631.992.941	UT	21.220.132.236	OT	21.894.721.448,00	UT	22.559.038.217	OT	12.668.781.932,00	UT	9,39
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.586.865.621	OT	6.902.381.491	UT	7.477.951.040,00	OT	9.025.861.668,00	OT	9.742.870.570,00	OT	19,11
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.403.914.840	OT	87.176.848.340	OT	93.048.720.406,45	OT	117.037.760.867,19	OT	244.016.109.209,04	OT	48,17
1.2	Dana Perimbangan	1.174.619.195.741	OT	1.250.626.353.033	OT	1.279.990.558.283	UT	1.573.615.108.481	OT	1.624.715.625.119	UT	8,76
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.125.348.741	OT	41.463.345.033	OT	38.414.990.283	UT	50.275.933.273	OT	50.852.354.977	UT	-3,67
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.066.318.427.000	E	1.142.586.588.000	E	1.164.196.398.000	E	1.204.344.586.098	OT	1.271.590.067.902	E	10,3
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.175.420.000	E	66.576.420.000	E	77.379.170.000	E	318.994.589.110	UT	302.273.202.240	UT	-0,2
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	445.529.063.552	OT	491.413.000.397	OT	707.207.496.446	OT	460.792.113.643	UT	585.081.231.492	OT	19,59
1.3.1	Hibah	1.809.833.374	UT	1.053.091.397	UT	1.779.632.600	UT	0	UT	942.739.891	UT	6,79
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.633.165.698	OT	115.022.833.000	OT	142.333.018.338	OT	143.325.208.643	UT	171.067.103.920	OT	25,66
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	319.829.819.000	E	307.400.751.000	E	413.181.317.000	UT	0	E	55.646.870.000	OT	27,25
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.256.245.480	UT	67.936.325.000	UT	41.238.559.508	UT	73.600.480.000	UT	46.337.071.481	UT	6,85
1.3.7	Dana Desa	0	-	0	-	108.674.969.000	E	243.866.425.000	E	311.087.446.200	E	0
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.735.589.679.346	OT	1.919.961.769.290	OT	2.177.820.724.857,45	OT	2.258.604.630.605	OT	2.581.515.295.917	UT	12,42

Keterangan: OT (Over Target), UT (Under Target), E (Equal Target)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

b. Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Klaten pernah melakukan pinjaman, sehingga ada pos Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menjamin pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
 - d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan. Pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik dapat dianggarkan, tetapi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Gambaran perkembangan Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
01.	2013	1.067.791.179.116,00	1.621.602.407.460,00	65,85
02.	2014	1.153.532.178.451,00	1.884.326.293.738,00	61,22
03.	2015	1.180.489.400.884,45	2.077.785.996.047,45	56,81
04.	2016	1.238.738.884.717,00	2.282.330.771.499,00	54,28
05.	2017	1.032.184.118.848,00	2.481.861.743.842,22	41,59

Sumber: *Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun di tahun 2017 proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah sudah mendekati angka 40%, akan tetapi rata-rata proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas sehingga tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Gambaran perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3.9 Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2013 REALISASI	2014 REALISASI	2015 REALISASI	2016 REALISASI	2017 REALISASI	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2	BELANJA DAERAH						
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.231.648.343.886	1.371.866.130.869	1.504.110.830.929,45	1.780.715.488.258	1.716.862.293.365	9,83
2.1.1	Belanja Pegawai	1.067.791.179.116	1.153.532.178.451	1.180.489.400.884,45	1.238.738.884.717	1.032.184.118.848	1,12
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	0	0	-20,00
2.1.4	Belanja Hibah	22.051.956.000	20.414.548.593	43.174.386.818,00	32.171.055.836	48.124.969.930	50,06
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.255.817.000	12.085.520.000	10.174.075.000,00	11.810.425.000	1.149.725.000	-19,98
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	468.086.495	562.563.825	613.004.277,00	5.826.321.071	9.970.076.237	190,42
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	128.767.165.275	184.455.220.000	269.659.963.950,00	491.908.747.434	625.433.403.350	59,99
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.314.140.000	816.100.000	-	260.054.200	0	233,89
2.2	Belanja Langsung	389.954.063.574	512.460.162.869	573.675.165.118,00	501.615.283.241	764.999.450.477,22	18,76
2.2.1	Belanja Pegawai	22.524.865.518	26.874.641.533	25.991.120.706,00	27.421.377.821	60.130.715.274,40	32,79
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.545.654.960	217.028.485.527	241.611.733.549,00	253.434.818.137	339.931.253.564,82	17,86
2.2.3	Belanja Modal	186.883.543.096	268.557.035.809	306.072.310.863,00	220.759.087.283	364.937.481.638,00	19,49
	Jumlah Belanja Daerah	1.621.602.407.460	1.884.326.293.738	2.077.785.996.047,45	2.282.330.771.499	2.481.861.743.842,22	11,54

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Proporsi belanja tidak langsung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, rata-rata sebesar 9,83%. Komponen yang menyebabkan kenaikan belanja tidak langsung adalah belanja hibah sebesar 50,06%, belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa mengalami kenaikan rata-rata sebesar 190,42 %, sementara untuk komponen lainnya mengalami penurunan.

Belanja langsung mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 18,76%, akan tetapi nominalnya masih jauh dibawah belanja tidak langsung. Kenaikan terbesar disumban oleh naiknya belanja pegawai sebesar 32,79%. Belanja modal naik rata-rata sebesar 19,49% sedangkan belanja barang dan jasa naik rata-rata sebesar 17,86%.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2013 REALISASI	2014 REALISASI	2015 REALISASI	2016 REALISASI	2017 REALISASI	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.527.643.342	265.628.451.228	286.555.911.908	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	29,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	22.442.938.777	0,00	0,00	-20,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	63.231.687,00	0	-20,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	2.126.284.398	0,00	0,00	-20,00
	- Jumlah Penerimaan Pembiayaan	164.527.643.342	265.628.451.228	311.125.135.083	406.262.095.580,00	374.231.954.686,16	29,24
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				0	0	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-6,67
3.2.2	Penyertaan Modal (<i>Investasi</i>) Pemerintah Daerah	4.961.000.000	3.758.000.000	4.961.000.000	5.304.000.000,00	13.200.000.000,00	41,64
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0,00	0,00	-20,00
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Daerah	1.925.464.000	4.950.014.872	0	0,00	0,00	46,94
	- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.886.464.000	14.708.014.872	4.961.000.000	8.304.000.000,00	18.200.000.000,00	19,21
	Pembiayaan Netto	151.641.179.342	250.920.436.356	306.164.135.083	397.958.095.580,00	356.031.954.686,16	34,14

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Dari Tabel 3.10 tersebut terlihat, bahwa perkembangan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun perkembangannya fluktuatif, hal ini mengingat bahwa struktur pembiayaan sangat dipengaruhi kebijakan pembelanjaan daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca daerah dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah. Neraca daerah dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif dan dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2013 – 2017 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3.11 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 -2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	285.620.514.893	302.285.121.763	437.690.241.287	410.382.878.167	554.188.344.902,01	27,65
1.1.1.	Kas	265.652.176.311	286.597.112.808	407.787.395.839	377.061.328.850	455.698.293.160,98	24,99
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00
1.1.3.	Piutang	8.739.113.731	5.908.034.822	11.502.937.848	11.485.245.890	24.768.949.105,58	95,74
1.1.4.	Beban dibayar dimuka	0	0	331.077.122	321.124.429	590.700.392,38	16,19
1.1.5.	Persediaan	11.229.224.851	9.779.974.134	18.068.830.478	21.515.178.997	73.130.402.243,07	39,82
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	100.252.828.930	105.820.727.339	113.532.100.866	123.767.913.031	133.715.351.862,86	7,53
1.2.1.	Investasi jangka Panjang	100.252.828.930	105.820.727.339	113.532.100.866	123.767.913.031	133.715.351.862,86	7,53
1.2.	ASET TETAP	5.854.712.911.191	6.076.201.185.121	2.018.864.139.349	2.836.455.459.908	2.958.585.555.502,38	-2,80
1.2.1.	Tanah	787.057.915.090	787.057.915.090	587.794.216.923	1.291.905.063.673	1.281.651.012.843,00	18,74
1.2.2.	Peralatan dan mesin	430.294.349.550	457.867.431.178	635.690.333.679	746.367.762.112	716.935.744.066,99	13,08
1.2.3.	Gedung dan bangunan	2.974.196.179.457	3.034.548.541.218	722.861.663.470	761.362.497.206	701.477.235.200,18	-14,95
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.515.867.087.106	1.543.939.927.005	863.956.941.426	888.503.282.799	1.019.259.420.540,00	-3,85
1.2.5.	Aset tetap lainnya	66.092.925.566	70.098.119.359	253.279.160.830	260.590.146.678	339.502.207.078,21	60,74
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	81.204.454.422	182.689.251.271	80.027.889.411	88.444.314.356	100.702.381.485,00	200,02
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	0	0	-1.124.746.066.390	-1.200.717.606.916	1.200.942.445.711,00	0,00
1.3	DANA CADANGAN	14.926.888.371	22.442.938.777	0	3.019.210.084	8.422.000.455,00	41,53
1.3.1	Dana Cadangan	14.926.888.371	22.442.938.777	0	3.019.210.084	8.422.000.455,00	41,53
1.4.	ASET LAINNYA	25.709.856.351	23.513.749.710	127.237.373.547	109.962.520.042	71.821.862.345,00	81,67
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	0,00	0,00
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian	4.208.280.997	719.224.500	0	0	0,00	-36,95

No.	Uraian daerah	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	10.138.665.074	10.138.665.074	10.138.665.074	10.138.665.074	10.138.665.074,00	0,00
1.4.4.	Aset tak berwujud	11.275.949.280	12.568.899.136	0	7.757.994.761	2.973.112.557,00	4,34
1.4.5.	Aset Lain-lain	86.961.000	86.961.000	117.098.708.473	92.065.860.207	58.710.084.714,00	26.880,60
JUMLAH ASET DAERAH		6.281.222.999.736,15	6.530.263.722.710,67	2.697.323.855.048,81	3.483.587.981.231,42	3.726.733.115.067,25	-35,55
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.725.083	41.200.900	3.858.482.765	4.793.147.073	12.014.878.813,00	1.889,99
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	23.725.083	41.200.900	13.644.613	15.301.815	12.786.400,00	0,33
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	0,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0	0	0	853.383.637	765.686.875,00	-2,06
2.1.4.	Utang Beban	0	0	3.844.838.152	3.924.461.621	4.896.212.678,00	4,95
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0	6.340.192.860,00	0,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.1.	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		23.725.083	41.200.900	3.858.482.765	4.793.147.073	12.014.878.813,00	1.889,99
3.	EKUITAS DANA	6.281.199.274.654	6.530.222.521.811	2.693.465.372.284	3.475.537.595.081	3.714.718.236.254,25	-2,56
3.1	EKUITAS DANA	6.281.199.274.654	6.530.222.521.811	2.693.465.372.284	3.475.537.595.081	3.714.718.236.254,25	-2,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.281.222.999.737	6.530.263.722.711	2.697.323.855.049	3.480.330.742.154	3.726.733.115.067,25	-2,51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017 sebagaimana Tabel 3.12

Tabel 3.12 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio lancar (current ratio)	85.423,08	54.114,61	680,12	559,23	262,49
2.	Rasio quick (quick ratio)	84.949,78	53.877,23	675,43	554,74	256,41
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,000003	0,000005	0,0008	0,0008	0,004
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,000004	0,000006	0,001	0,001	0,003
5.	Rata-rata umur piutang	1,15	1,39	1,46	1,86	2,56
6.	Rata-rata umur persediaan	395,77	392,04	281,28	335,77	236,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.:

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah yaitu rasio lancar dan rasio *quick*.

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2017 adalah sebesar 262,49. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancar Pemerintah Kabupaten Klaten cukup besar, yaitu lebih dari 262 kali.

2. Rasio Quick

Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada Tahun 2017 adalah sebesar 256,41. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar (kas dan setara kas) adalah sangat baik, lebih dari 256 kali..

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2017 sebesar 0,004. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2017 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa Klaten tidak tergantung pada hutang.

Rasio aktivitas terdiri dari dua perhitungan yaitu rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

1. Berdasarkan Tabel 3.12 rasio rata-rata umur piutang Tahun 2017 sebesar 2,56. Hal ini menunjukkan bahwa hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), adalah kurang dari 3 hari.
2. Rata-rata umur persediaan Tahun 2017 sebesar 236,19 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencukupi input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan output pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Untuk mengetahui efisiensi serta efektifitas belanja dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsipenggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dalam hal ini dilakukan dengan melakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Klaten dari tahun 2013-2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13 dan 3.14.

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
A.	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	787.366.981.924	806.358.187.788	846.942.405.611	877.336.557.352	726.286.627.644
2	Belanja Tambahan Penghasilan	272.757.794.850	338.827.293.536	325.243.845.148	352.368.203.015	294.815.595.537
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.172.000.000	4.773.120.000	4.703.820.000	4.747.920.000	6.873.120.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.210.928.502	3.573.577.127	2.901.706.250	3.201.693.750	3.777.764.289
B.	Belanja Langsung					
1	Belanja Honorarium PNS	6.182.920.350	25.834.617.033	23.459.269.706	8.595.060.850	11.221.516.000
2	Belanja Uang Lembur	951.387.500	1.040.024.500	1.395.346.000	1.104.515.000	11.584.146.841
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	493.500.000	0	1.162.000.000	448.000.000	0
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	545.080.128	0	1.398.102.902	1.872.075.669	2.982.495.386
5	Belanja premi asuransi kesehatan	616.754.000	0	341.652.678	9.265.525.311	8.859.617.031
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	12.151.872.538	0	19.007.526.525	18.284.220.469	35.552.221.032

No.	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	141.100.000	0	683.979.620	361.794.500	643.892.070
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.692.906.000	0	725.177.500	420.934.500	1.329.192.100
9	Belanja perjalanan dinas	22.118.701.731	0	29.722.053.978	36.778.501.757	52.803.734.979
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0	0	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	91.374.589.343	0	120.702.685.149	198.349.846.715	64.736.175.589
TOTAL		1.202.776.516.866	1.180.406.819.984	1.378.389.571.067	1.513.134.848.888	1.221.466.098.498

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tabel 3.14 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun 2013	1.202.776.516.866	1.634.488.871.460	74
2	Tahun 2014	1.180.406.819.984	1.899.034.308.610	62
3	Tahun 2015	1.378.389.571.067	2.082.746.996.047	66
4	Tahun 2016	1.513.134.848.888	2.290.634.771.499	66
5	Tahun 2017	1.221.466.098.498	2.492.861.743.842	49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 relatif menurun.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi defisit yang harus ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus.

Defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil, komposisi penutup Defisit Riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2013- 2017 sebagaimana Tabel 3.15 dan Tabel 3.16

Tabel 3.15 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.735.589.679.346	1.919.961.769.290	2.177.820.724.857,45	2.258.604.630.605	2.581.515.295.917,04
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.621.602.407.460	1.884.326.293.738	2.077.785.996.047,45	2.282.330.771.499	2.481.861.743.842,22
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.886.464.000	14.708.014.872	4.961.000.000,00	8.304.000.000,00	18.200.000.000,00
A	Surplus/Defisit riil	101.100.807.886	20.927.460.680	95.073.728.810,00	-23.726.140.893,84	99.653.552.074,82
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran	164.527.643.342	265.628.451.228	286.555.911.908,00	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
	sebelumnya					
5.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	22.442.938.777,00	0,00	0,00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0,00	63.231.687,00	0
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	2.126.284.398,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	164.527.643.342	265.628.451.228	311.125.135.083,00	406.262.095.580,00	374.231.954.686,16
A+ B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	265.628.451.228	286.555.911.908	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	406.198.863.893	100	374.231.954.686	100	455.685.506.760,98	100	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	22.154.827.628	5,45	20.497.700.481,19	5,48	36.205.998.306,04	7,95	6,29
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-1.213.257.717	-0,30	91.421.538.661,00	24,43	(76.414.215.783,00)	-16,77	2,45
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.500.279.446	1,35	-27.865.164.357,00	-7,45	8.546.697.492,00	1,88	-1,41
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	398.840.640.718,00	98,19	369.172.722.999,16	98,65	455.685.506.760,82	100,00	98,95
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Tahun 2013 sejumlah Rp.1,1 Trilyun, tahun 2017 menjadi Rp.2,088 Trilyun, dengan pengeluaran terbesar pada belanja tidak langsung. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.17

Tabel 3.17 Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1)	2	3)	4)	5)	6)	7	8
A	Belanja Tidak Langsung	941.826.207.770	1.016.563.332.418	1.498.247.755.929	1.411.990.601.693	1.416.688.197.161	12,47
1	Belanja Pegawai	787.367.000.000	806.358.000.000	1.180.489.400.884	877.336.557.352	726.286.627.644	1,48
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH	3.172.000.000	4.773.000.000	4.311.000.000	4.747.920.000	6.873.120.000	23,92
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
4	Belanja Hibah	22.051.956.000	20.414.548.593	43.174.386.818	32.171.055.836	48.124.969.930	32,04
5	Balena Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	468.086.495	562.563.825	613.004.277	5.826.321.071	9.970.076.237	237,68
6	Balena Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	128.767.165.275	184.455.220.000	269.659.963.950	491.908.747.434	625.433.403.350	49,75
B	Belanja Langsung	373.612.118.056	493.572.162.869	570.257.044.412	496.826.235.722	747.835.869.405	-14,15
1	Belanja Honorarium PNS / Non PNS /Non Pegawai	6.182.920.000	7.986.641.533	22.573.000.000	23.080.330.303	42.967.134.202	75,05
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	493.500.000	0	1.162.000.000	448.000.000	0	-65,36
3	Belanja Barang dan Jasa	180.545.654.960	217.028.485.527	241.611.733.549	252.986.818.136	339.931.253.565	17,65
4	Belanja Modal	186.883.543.096	268.557.035.809	306.072.310.863	220.759.087.283	364.937.481.638	23,78
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.886.464.000	14.708.014.872	11.000.000.000	8.304.000.000	18.200.000.000	20,90
1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	3.000.000.000	5.000.000.000	-8,33
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.961.000.000	3.758.000.000	11.000.000.000	5.304.000.000	13.200.000.000	66,39
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00
4	Pembayaran Kewajiban Daerah	1.925.464.000	4.950.014.872	0	0	0	-25,00
TOTAL (A+B+C)		1.328.324.789.826	1.524.843.510.159	2.079.504.800.341	1.917.120.837.415	1.477.855.331.363	5,11

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

3.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Dari perhitungan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 5 tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan dana dari pusat sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 - 2021.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2018 - 2021, sebagai berikut

1. Mencapai target pendapatan daerah di Kabupaten Klaten sehinggalapada tahun 2021 dapat mencapai Rp.2.947.748.443.338,- berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan tiap tahun sebesar 7% dan secara bertahap diharapkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus meningkat.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) intensifikasi pajak dan retribusi daerah, (ii) optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, khususnya PBB, (iii) penyesuaian tarif retribusi daerah, (iv) pemberian stimulus penghargaan pajak dan retribusi daerah .
3. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah, ditempuh dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan retribusi daerah, yang didukung dengan regulasi yang jelas, baik dari sisi pengelolaannya maupun tarifnya.
 - c. Peningkatan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah antara lain PDAM, PD BPR Bank Klaten dan PD BPR Bank Kredit Kecamatan serta peningkatan pembagian deviden Bank Jateng.
 - d. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - g. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.

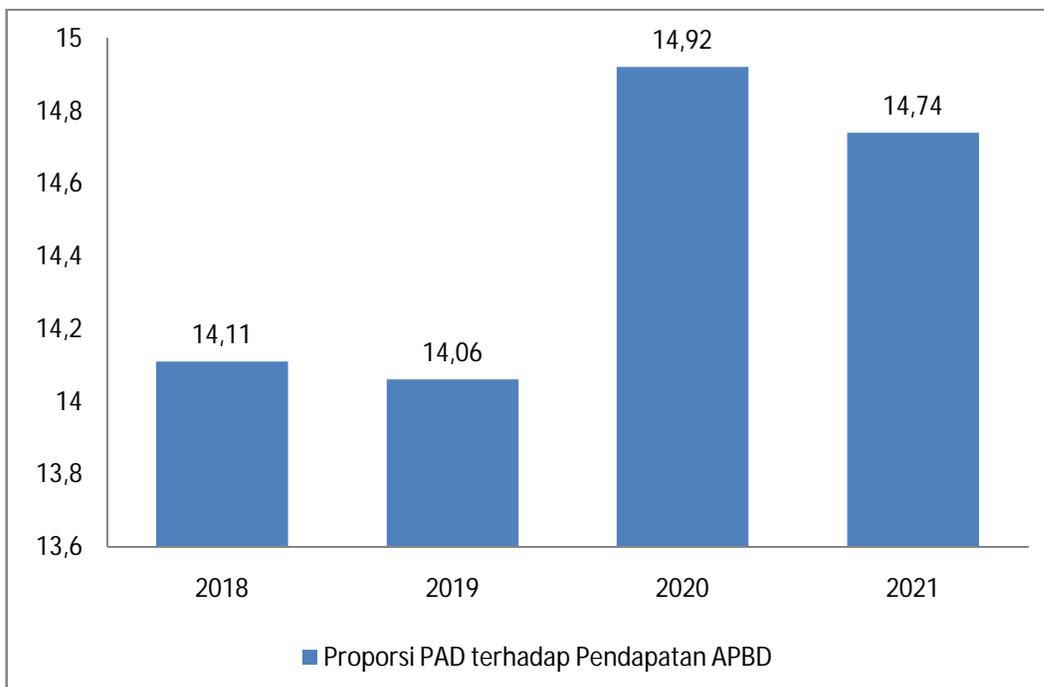
4. Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan diusahakan untuk mendorong perkembangan investasi daerah.
5. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi diasumsikan besarnya tetap setiap tahun, berdasarkan angka tahun 2018.
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
 - a. Perbaiki sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9. Dana desa besarnya diasumsikan sama dengan tahun 2018.

Adapun Proyeksi perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN POS PENDAPATAN	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	354.566.542.500	379.386.200.475	405.943.234.508	434.359.260.924
1.1.1	Pajak Daerah	100.232.189.000	107.248.442.230	114.755.833.186	122.788.741.509
1.1.2	Retribusi Daerah	14.797.502.000	15.833.327.140	16.941.660.040	18.127.576.243
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.827.999.000	10.515.958.930	11.252.076.055	12.039.721.379
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	229.708.852.500	245.788.472.175	262.993.665.227	281.403.221.793
1.2	Dana Perimbangan	1.679.025.419.000	1.732.369.077.486	1.720.139.192.536	1.894.438.137.013
1.2.1	Bagi Hasil dari Pajak dan Bukan Pajak	46.839.153.000	38.644.153.000,00	50.852.354.977,00	60.852.354.977,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000,00	1.271.590.067.902,00	1.310.590.067.902,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	394.218.939.000	455.757.597.486,00	397.696.769.656,53	522.995.714.134,46
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	478.661.181.000	587.498.065.000	594.571.339.401	618.951.045.401
1.3.1	Hibah	4.580.000.000	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152.560.887.000	152.560.887.000,00	171.067.103.920,00	181.067.103.920,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0,00	55.646.870.000,00	55.646.870.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	113.416.884.000,00	46.337.071.481,00	52.237.071.481,00
1.3.6	Dana Desa	321.520.294.000	321.520.294.000,00	321.520.294.000	330.000.000.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.512.253.142.500	2.699.253.342.961	2.720.653.766.445	2.947.748.443.338

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018



Gambar 3.3. Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan APBD (dalam persen)

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2021

Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan pada pendekatan beban kinerja yang berorientasi pada pencapaian. Hal ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah. Adapun arah pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran Tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja.** Belanja daerah pada setiap urusan disertai indikator kinerja dan target kinerja.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efisien dan efektif.
5. **Transparan dan Akuntabel.** Pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, juga akan ditempuh:

1. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan menekankan pada aspek: efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Proyeksi belanja pegawai (belanja tidak langsung) karena sudah tidak ada lagi kebijakan kenaikan gaji pegawai maka dihitung berdasarkan belanja pegawai tahun yang lalu. Sekalipun akan ada penambahan CPNS di tahun 2019, tetapi jumlahnya lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun.

3. Komponen belanja tidak langsung yang lain diasumsikan sama dengan sebelumnya dan berpedoman pada perhitungan yang sudah ditentukan.
4. Belanja Langsung untuk tahun 2018 berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk tahun 2019-2021 sesuai dengan proyeksi kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.
5. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun proyeksi perkembangan belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021 sebagaimana Tabel 3.19 dan Tabel 3.20

Tabel 3.19 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2021

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	1.788.124.791.500	1.802.858.641.961	1.812.013.820.433	1.802.237.291.338
1	Belanja Pegawai	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	11.395.502.000	12.308.176.937	13.169.749.323	14.091.631.775
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	611.819.504.000	628.640.679.524	636.934.285.610	626.235.874.063
4	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	0	0	0
B	Belanja Langsung	202.217.883.867	132.517.107.780	135.379.477.307	138.303.674.016
1	Belanja Honorarium Non PNS	43.720.865.024	16.746.009.262	17.107.723.062	17.477.249.880
2	Belanja Pegawai BLUD	7.306.716.200	4.644.078.113	4.744.390.201	4.846.869.029
3	Belanja Jasa Kantor	35.641.295.483	53.972.675.346	55.138.485.133	56.329.476.412
4	Belanja Bahan Pakai Habis	29.213.290.936	22.031.674.225	22.507.558.388	22.993.721.649
5	Belanja premi Asuransi	9.290.867.000	9.902.316.504	10.116.206.540	10.334.716.601
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.683.892.893	3.209.188.501	3.278.506.972	3.349.322.723
7	Belanja barang dan jasa BLUD	73.360.956.331	22.011.165.829	22.486.607.011	22.972.317.722
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.000.000.000	13.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000	10.000.000.000	0	3.000.000.000
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
4	Pembayaran Kewajiban Daerah	0	0	0	0
TOTAL (A+B+C)		2.001.342.675.367	2.001.342.675.367	1.824.584.070.390	1.833.019.743.098

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tabel 3.20 Prediksi Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN POS BELANJA	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.846.597.441.500	1.845.458.641.961	1.884.613.820.433	1.844.337.291.338
2.1.1	Belanja Pegawai	1.161.909.785.500,00	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500
2.1.4	Belanja Hibah	55.987.450.000,00	40.500.000.000	70.500.000.000	40.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000,00	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	11.395.502.000,00	12.308.176.937	13.169.749.323	14.091.631.775
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	611.819.504.000	628.640.679.524	636.934.285.610	626.235.874.063
2.1.8	Belanja Tidak Tersangka / Terduga	3.000.000.000,00	0	0	0
2.2	Belanja Langsung	809.905.701.000	840.794.701.000	859.039.946.012	1.097.411.152.000
2.2.1	Belanja Pegawai	77.712.564.564,00	50.000.000.000	51.085.000.000	52.193.544.500
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.653.337.665,00	250.000.000.000	255.425.000.000	260.967.722.500
2.2.3	Belanja Modal	317.539.798.771,00	540.794.701.000	552.529.946.012	784.249.885.000
Jumlah Belanja Daerah		2.656.503.142.500	2.686.253.342.961	2.743.653.766.445	2.941.748.443.338
Surplus / (Defisit)		-144.250.000.000	13.000.000.000	-23.000.000.000	6.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018–2021 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah diarahkan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi, dengan upaya untuk menekan pertumbuhannya.
- b. Pinjaman daerah ditempuh sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah, sebagai opsi pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- d. Intensifikasi penagihan piutang pajak dan retribusi daerah, terutama piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk:

- a. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah diupayakan dengan memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- c. Merumuskan kerangka kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta untuk mendanai pembangunan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021 sebagaimana Tabel 3.21

Tabel 3.21 Prediksi Perkembangan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN POS BELANJA	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.250.000.000	0	0	0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	26.000.000.000	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	155.250.000.000	0	26.000.000.000	0
	- Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000	10.000.000.000	0	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
3.2.5	Pembayaran Kewajiban Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000	13.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
	Pembiayaan Netto	144.250.000.000	-13.000.000.000	23.000.000.000	-6.000.000.000
	Sisa Lebih Pembayaran Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018.

3.3.2.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan selama kurun waktu 2018-2021, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah guna mendanai pembangunan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.22

Tabel 3.22 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Guna Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	2.512.253.142.500	2.699.253.342.961	2.720.653.766.445	2.947.748.443.338
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	26.000.000.000	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA)	155.250.000.000	0	0	0
4.	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0
	Total Penerimaan	2.667.503.142.500	2.699.253.342.961	2.746.653.766.445	2.947.748.443.338
	Dikurangi :				
5.	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I)	2.001.342.675.367	1.824.584.070.390	1.833.019.743.098	1.849.995.908.146
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	666.160.467.133	874.669.272.571	913.634.023.347	1.197.752.535.192

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Klaten, 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan dengan proyeksi sebagaimana terlihat pada tabel 3.23

Tabel 3.23 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Keuangan Daerah	2.667.503.142.500	2.699.253.342.961	2.746.653.766.445	2.947.748.443.338
	Prioritas I (Wajib dan mengikat)	2.001.342.675.367	1.948.375.749.741	1.950.393.297.740	1.946.540.965.354
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.788.124.791.500	1.802.858.641.961	1.812.013.820.433	1.802.237.291.338
1.2	Belanja Langsung	202.217.883.867	132.517.107.780	135.379.477.307	138.303.674.016
1.3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.000.000.000	13.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	666.160.467.133	750.877.593.220	796.260.468.705	1.001.207.477.984
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	607.252.117.133	676.952.893.220	674.090.523.693	671.166.326.984
2.1	Belanja Langsung Penunjang Pencapaian visi misi Bupati	58.541.037.125	58.541.037.125	58.541.037.125	58.541.037.125
2.2	Belanja Langsung Untuk Mendanai Program dan Kegiatan sebagai Penjabaran dari Misi Pasangan Bupati Terpilih	548.711.080.008	618.411.856.095	615.549.486.568	612.625.289.859
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	58.472.650.000	42.600.000.000	72.600.000.000	42.100.000.000
3.1	Belanja Hibah	55.987.450.000	40.500.000.000	70.500.000.000	40.000.000.000
3.2	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
4	Surplus Anggaran Riil / Berimbang	435.700.000	31.324.700.000	49.569.945.012	287.941.151.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Dengan demikian, dapat diketahui Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II dan III sebagaimana terlihat pada tabel 3.24

Tabel 3.24 Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	Alokasi							
		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(%)						
1.	Prioritas I	2.001.342.675.367	75,04	1.948.375.749.741	73,03	1.950.393.297.740	72,31	1.946.540.965.354	73,18
2.	Prioritas II	607.252.117.133	22,77	676.952.893.220	25,37	674.090.523.693	24,99	671.166.326.984	25,23
3.	Prioritas III	58.472.650.000	2,19	42.600.000.000	1,60	72.600.000.000	2,69	42.100.000.000	1,58
	Total	2.667.067.442.500		2.667.928.642.961		2.697.083.821.433		2.659.807.292.338	

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan dan perhitungan kerangka pendanaan tersebut di atas, maka dapat dihitung proyeksi APBD Kabupaten Klaten periode 2018 – 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 3.25

Tabel 3.25 Proyeksi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	PENDAPATAN	2.512.253.142.500	2.699.253.342.961	2.720.653.766.445	2.947.748.443.338
A	Pendapatan Asli Daerah	354,566,542,500	379,386,200,475	405,943,234,508	434,359,260,924
1	Pajak Daerah	100,232,189,000	107,248,442,230	114,755,833,186	122,788,741,509
2	Retribusi Daerah	14,797,502,000	15,833,327,140	16,941,660,040	18,127,576,243
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,827,999,000	10,515,958,930	11,252,076,055	12,039,721,379
4	Lain-lain PAD yang sah	229,708,852,500	245,788,472,175	262,993,665,227	281,403,221,793
B	Dana Perimbangan	1.679.025.419.000	1.732.369.077.486	1.720.139.192.536	1.894.438.137.013
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	46.839.153.000,00	38.644.153.000,00	50.852.354.977,00	60.852.354.977,00
2	DAU	1.237.967.327.000,00	1.237.967.327.000,00	1.271.590.067.902,00	1.310.590.067.902,00
3	DAK	394.218.939.000,00	455.757.597.486,00	397.696.769.656,53	522.995.714.134,46
C	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	478.661.181.000	587.498.065.000	594.571.339.401	618.951.045.401
2	BELANJA	2.656.503.142.500	2.686.253.342.961	2.743.653.766.445	2.941.748.443.338
A	Belanja Tidak Langsung	1.846.597.441.500	1.845.458.641.961	1.884.613.820.433	1.844.337.291.338
1	Belanja Mengikat	1,788,124,791,500	1,680,677,378,284	1,696,823,529,326	1,676,891,156,814
2	Prioritas III	58,472,650,000	164,781,263,677	187,790,291,107	167,446,134,524
B	Belanja Langsung	809.905.701.000	840.794.701.000	859.039.946.012	1.097.411.152.000
1	Prioritas I	202,217,883,867	163,841,807,780	184,949,422,319	426,244,825,016
2	Prioritas II	607,252,117,133	676,952,893,220	674,090,523,693	671,166,326,984
	Surplus/Defisit	-144,250,000,000	13,000,000,000	-23,000,000,000	6,000,000,000
3	PEMBIAYAAN	144,250,000,000	-13,000,000,000	23,000,000,000	-6,000,000,000
A	Penerimaan	155,250,000,000	0	26,000,000,000	0
B	Pengeluaran	11,000,000,000	13,000,000,000	3,000,000,000	6,000,000,000
	Total APBD	2,656,503,142,500	2,686,253,342,961	2,743,653,766,445	2,941,748,443,338

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Berdasarkan kerangka pendanaan tersebut, akan dilaksanakan berbagai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Klaten selama empat tahun ke depan melalui dana APBD Kabupaten Klaten. Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Klaten diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu APBN, APBD Provinsi, Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan, Sumbangan Pihak Ketiga dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Penyajian permasalahan daerah dan permasalahan pembangunan daerah beserta rumusannya menempati bagian awal dalam penyajian isu-isu strategis daerah. Penyajian yang sistematis dan terstruktur akan mampu menjelaskan isu-isu strategis daerah yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 3 tahun mendatang atau sampai akhir periode 2021. Permasalahan dan analisis isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dari Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Seiring dengan penambahan penduduk dan dinamika perkembangan jaman yang cepat maka secara umum Kabupaten Klaten menghadapi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata dan penanganannya direncanakan harus dengan baik, sistematis, terukur dan berlanjut ;
2. Peningkatan jumlah penduduk dengan dinamika di dalamnya mempengaruhi struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sehingga pengendalian ruang tidak semudah yang direncanakan dalam tata ruang ;
3. Perubahan peruntukan pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian untuk keberlangsungan budidaya manusia khususnya perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari padahal luas lahan tetap ;
4. Luasan lahan pertanian abadi tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga salah satu dampaknya kontribusi sektor Pertanian dalam struktur PDRB sudah tidak lagi menjadi penyumbang yang terbesar padahal Kabupaten Klaten dikenal dengan kesuburan tanah dan perannya sebagai salah satu penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (*pasir , kerikil dan batu*) di sepanjang aliran Sungai Woro apalagi yang tidak berijin dan lokasinya di luar zona yang ditentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 yang masuk wilayah kawasan Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko menjadi tumpuan penghidupan ribuan masyarakat sejak puluhan tahun lalu semakin kompleks dinamikanya dan hasil penambangan tersebut berdampak rusaknya infrastruktur jalan jembatan yang dilalui padahal secara umum seharusnya Wilayah Kecamatan Kemalang menjadi kawasan tangkapan/serapan air bagi wilayah Kabupaten Klaten ;
6. Kontribusi/proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur APBD masih <10% sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Mengingat letak wilayah Kabupaten Klaten relatif di tengah Pulau Jawa maka potensi kerawanan terjadinya bencana alam gempa bumi tektonik dan letusan Gunung Merapi cukup besar selain bencana tanah longsor, angin topan, banjir dan kekeringan yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun sehingga Wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai “ *laboratorium bencana alam* ” ;
8. Terjadinya kesenjangan (*disparitas*) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat

sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/*stagnan*. Hal ini untuk wilayah utara (Wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung) boleh jadi salah satunya disebabkan letaknya berdekatan dengan Gunung Merapi dan untuk wilayah selatan (Kecamatan Cawas, Bayat, Gantiwarno dan Prambanan) boleh jadi disebabkan potensi kegempaan yang berada pada tingkat menengah sehingga tanahnya labil yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan ;

9. Pertumbuhan investasi/penanaman modal di Wilayah Kabupaten Klaten tidak sebesar yang masuk ke kabupaten tetangga kawasan “ *subosukawonosraten* “ (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar, Wonogiri dan Sragen).

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum bentuk/wujud pembangunan dibedakan menjadi (1) pembangunan fisik/material dan (2) non fisik/non material. Walaupun wujud/bentuknya berbeda namun sarannya manusia dan keduanya bertujuan memperlancar kelangsungan kehidupan serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan manusia. Baik pembangunan fisik maupun non fisik apabila pada saat perencanaan dengan pelaksanaan dan kenyataan hasil tidak sesuai maka dikatakan terjadi “permasalahan”.

Secara umum permasalahan pembangunan pada aspek ini meliputi 3 (tiga) fokus : (1) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ; (2) Kesejahteraan Sosial dan (3) Seni Budaya dan Olah Raga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan terdiri dari : faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang ada dan mempengaruhi bidang/urusan/sector sendiri serta relatif dapat dikendalikan sedangkan faktor eksternal meliputi hal-hal yang mempengaruhi, bersal dari luar dan relatif tidak dapat dikendalikan namun hanya diprediksikan dengan pendekatan batasan-batasan tertentu.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat, keluarga dan individu selain ditentukan seberapa besar kemampuan produktifitas masyarakat, keluarga dan individu dalam memproduksi barang/jasa sendiri juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lokal Kabupaten Klaten. Kondisi makro perekonomian Kabupaten Klaten dipengaruhi kondisi perekonomian kawasan regional Subosukawonosraten atau Joglo Semar dan Nasional. Fokus ini kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup : pertumbuhan ekonomi, kondisi PDRB baik konstan maupun berlaku dan inflasi. Secara umum permasalahan yang ditemukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2013-2017 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Klaten masih *fluktuatif*,
2. Kontribusi lapangan usaha/sector Pertanian terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku semakin menurun padahal Kabupaten Klaten berperan sebagai salah satu penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah ;

3. Kontribusi lapangan usaha/sector Perdagangan Besar dan Eceran terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku masih belum sesuai harapan (< 3 %) ;
4. Kontribusi lapangan usaha/sector Industri Pengolahan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan masih fluktuatif dan masih di bawah 2 digit (6–9 %) ;
5. Kontribusi lapangan usaha/sector *real estate* terhadap PDRB Harga Berlaku sangat kecil atau masih <5% ;
6. Inflasi di Kabupaten Klaten masih *fluktuatif* karena dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan nasional;
7. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten sebesar 14,15% melebihi rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional ;
8. Kabupaten Klaten dengan sumber daya yang memiliki tanah yang subur, sumber air yang banyak, posisi strategis di antara Kota Surakarta dan Yogyakarta jalur tengah transportasi darat Pulau Jawa, etos kerja masyarakat yang tinggi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat termasuk urutan ke 7 (tujuh) kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah ;
9. Upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Kabupaten Klaten bukan belum optimal dan terpadu namun lebih pada pengaruh variabel-variabel lain yang tinggi.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Terdiri dari bidang: (1)Ketenagakerjaan; (2)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3)Pangan dan (4)Kelautan dan Perikanan. Fokus ini ditekankan pada nilai eksistensi/peran dan kebutuhan manusia yang seharusnya. Secara umum permasalahan setiap bidang sebagai berikut :

1. Bidang Ketenagakerjaan menghadapi permasalahan:
 - a. Tingginya pengangguran/pencari kerja usia angkatan kerja;
 - b. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,35%;
 - c. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun;
 - d. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja/buruh masih rendah;
 - e. Minat bekerja di luar wilayah Kabupaten Klaten masih tinggi;
 - f. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja disebabkan: (i)Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii)Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii)Ketidaksiharian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki dan (iv)Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
 - g. Belum optimalnya perlindungan dan advokasi terhadap tenaga kerja.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi permasalahan:
 - a. Kesempatan memperoleh hak pelayanan pendidikan (*harapan dan rata-rata lama sekolah*) belum sebaik laki-laki ;

- b. Peran dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga publik dan parlemen daerah semakin menurun ;
 - c. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - d. Posisi tawar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum sesuai harapan ;
 - e. Kasus kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual dan penelantaran terhadap perempuan dan anak masih tinggi.
3. Bidang Pangan menghadapi permasalahan :
- a. Diversifikasi dan tata kelola pangan nabati non padi/kacang (kedelai) dan tebuserta hewani (daging sapi dan susu) belum dikelola maksimal dan didorong ke arah kemandirian pangan;
 - b. Kelembagaan distribusi pangan belum berperan sebagaimana mestinya;
 - c. Pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari belum optimal;
 - d. Rendahnya kualitas produk pangan yang mampu bersaing di pasarglobal baik berbentuk pangan mentah maupun olahan.
4. Bidang Kelautan dan Perikanan menghadapi permasalahan :
- a. Sarana prasarana, kapasitas petani dan kelembagaan belum sebagaimana yang diharapkan apabila dituntut berperan menghasilkan benih unggul/berkualitas ;
 - b. Pengelolaan perikanan terpadu berbasis sistem minapolitan yang sudah berjalan masih perlu ditingkatkan ;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makan ikan, apabila dibanding dengan standart tingkat konsumsi makan ikan di tingkat eks Karesidenan Surakarta maupun Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Pengelolaan manajerial lembaga teknis daerah (Balai Benih Ikan) masih perlu ditingkatkan ;
 - e. Adanya ketergantungan pakan ikan pabrikan;
 - f. Perlunya inovasi dan teknologi tepat guna pembuatan pakan ikan berbahan lokal sekitar dan dapat dikerjakan sendiri.
5. Bidang Transmigrasi menghadapi permasalahan :
- a. Jumlah transmigran yang berangkat tergantung kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah tujuan;
 - b. Berkurangnya minat masyarakat bertransmigrasi swakarsa;
 - c. Masih rendahnya kualitas ketrampilan calon transmigran.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Terdiri dari bidang : (1) Kepemudaan dan Olah Raga serta (2) Kebudayaan. Fokus ini ditekankan pada layanan pemerintah daerah terhadap olah raga dan batin manusia. Secara umum permasalahan setiap bidang sebagai berikut :

1. Kepemudaan dan Olahraga menghadapi permasalahan:

- a. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan;
 - b. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang keolahragaan penyandang *disabilitas* ;
 - c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan dan olah raga;
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar.
2. Bidang Kebudayaan menghadapi permasalahan:
- a. Jumlah sarana prasarana kebudayaan belum sebanding dan belum merata di setiap kecamatan;
 - b. Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya dikarenakan keterbatasan anggaran ;
 - c. Kurangnya pembinaan, promosi serta pengembangan atraksi dan seni budaya daerah dikarenakan keterbatasan anggaran ;
 - d. Belum optimalnya perlindungan/pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual);
 - e. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa jawa masih lemah.

4.1.2. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

Secara umum aspek pelayanan umum ditekankan pada sejauh mana daerah dalam menyediakan layanan sarana prasarana dasar dan sosial dasar serta unsur penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Aspek ini meliputi 2 (dua) fokus : (1) Pelayanan Dasar dan (2) Pelayanan Penunjang. Mengingat peran dan fungsi yang strategis maka dalam pembangunan pelayanan dasar diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

A. Fokus Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :
 - a. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang berhak mendapat layanan pendidikan dasar tetapi tidak sekolah;
 - b. Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) berkisar 0,04-0,23% ;
 - c. Masih terdapatnya peserta didik pendidikan dasar yang tidak lulus di setiap tahun;
 - d. Semakin berkurangnya tenaga pendidik/guru kelas berstatus PNS pada sekolah dasar negeri;
 - e. Menurunnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya pada satuan layanan pendidikan dasar milik daerah/sekolah negeri;
 - f. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan dasar negeri (*terdapatnya anggapan sekolah favorit dan bukan favorit*);
 - g. Belum semua guru memenuhi kualifikasi pendidikan standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1).

- h. Belum semua kualitas sarana prasarana layanan pendidikan sekolah dasar negeri dalam kondisi baik ;
 - i. Belum semua satuan layanan pendidikan dasar/Sekolah Dasar memiliki sarana prasarana penunjang (perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan Ruang UKS) ;
2. Bidang Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya :
- a. Angka kematian ibu, bayi dan balita masih cukup tinggi;
 - b. Meningkatnya masyarakat yang terinfeksi HIV dan AIDS;
 - c. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular dan *degeneratif* (Diabetes Militus DM, Tuberculosis, Kardiovaskuler dan kanker);
 - d. Masih adanya balita gizi buruk dan *Stunting*;
 - e. Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masyarakat perdesaan masih cukup tinggi (67%) ;
 - f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
 - g. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi permasalahan :
- a. Masih 17-20% infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi sedang dan rusak berat ;
 - b. Masih 50% sarana prasarana pengairan dalam kondisi sedang dan rusak berat ;
 - c. Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi ;
 - d. Masih perlunya sarana prasarana penyediaan air minum perdesaan dan perkotaan ;
 - e. Perlunya sarana dan prasarana sanitasi pada permukiman masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air belum optimal;
 - g. Masih terdapat daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten;
 - h. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan ;
 - i. Belum jelasnya kebijakan *insentif-desinsentif* dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang ;
 - l. Belum optimalnya penanganan limbah secara terpadu;
 - m. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memenuhi luasan yang ditentukan 30%.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi permasalahan :
- a. Adanya rumah tidak layak huni yang tersebar merata di setiap kecamatan;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung permukiman;
 - c. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menghadapi permasalahan :
 - a. Masih adanya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja ;
 - b. Adanya potensi ancaman terorisme, konflik SARA (vertikal maupun horizontal) dan gerakan *bersifat* radikalisme/ laten ;
 - c. Potensi kerawanan bencana alam terjadi setiap tahun ;
 - d. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih masyarakat pada pilgub 2013 dan pilbup Tahun 2015.
 6. Bidang Sosial menghadapi permasalahan :
 - a. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten 14,15% melebihi rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ;
 - b. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
 - c. Kualitas pengelolaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu ditingkatkan ;
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan, fasilitasi hak sosial dan advokasi bagi penyandang *difabel*;
 - e. Kurang optimal dan sinergisnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).
- B. Fokus Pelayanan Penunjang
1. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a. Lingkungan Hidup menghadapi permasalahan :
 - 1) Kinerja armada dan petugas persampahan baru mampu mengangkut 8,34% dari keseluruhan timbulan sampah harian ke lokasi tempat pengolahan akhir (TPA) ;
 - 2) Belum optimalnya peran tempat pengolahan akhir (TPA) sampah terpadu ;
 - 3) Masih kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) publik;
 - 4) Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan;
 - 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
 - 6) Meningkatnya pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;
 - 7) Kesadaran pengelolaan dampak lingkungan para pelaku usaha atas usahanya belum optimal baik berbentuk AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) maupun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan);
 - 8) Banyaknya pelaku industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL);
 - 9) Belum optimalnya peran laboratorium lingkungan daerah ;
 - 10) Belum adanya instalasi pengolah limbah bahan berbahaya beracun (B3);
 - 11) Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat;

- 12) Masih perlunya pengembangan tanaman bunga–bungaan guna mendukung Klaten menjadi kota bunga sejuta warna.
- b. Bidang Kehutanan menghadapi permasalahan :
 - 1) Masih adanya lahan kritis;
 - 2) Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - 3) Masih kurang optimalnya perlindungan dan pelestarian satwa yang dilindungi;
 - 4) Kurangnya pemberdayaan masyarakat penangkar satwa burung nusantara ;
 - 5) Beralihnya kewenangan kehutanan ke pemerintah provinsi mengakibatkan birokrasi dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan menjadi panjang.
 2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi permasalahan:
 - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan;
 - b. Masih kurangnya inovasi proses pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat ;
 - c. Sentralisasi kewenangan pengadaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menjadikan pelayanan tidak cepat.
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menghadapi permasalahan:
 - a. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa ;
 - b. Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa ;
 - c. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa ;
 - d. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - e. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi dan kapasitas sumber daya lokal.
 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi permasalahan :
 - a. Belum semua pasangan usia subur sadar mengikuti Program Keluarga Berencana (masih 17-25% yang belum ber KB) ;
 - b. Kurangnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ ujung tombak lapangan sehingga setiap PLKB kelebihan beban kerja(secara rata-rata 1 orang PLKB harus melayani 5-6 desa padahal idealnya hanya melayani 2-3 desa) ;
 - c. Masih terdapat 8 kecamatan (30%) yang belum memiliki gedung dan pendukung kerja Program KB di lapangan ;
 - d. Kurang memadainya sarana prasarana gedung/kantor Bidang Keluarga Berencana kabupaten ;
 - e. Menurunnya kesadaran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung gerakan/Program KB;

- f. Capaian kinerja atas program ikutan Program KB (penguatan Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita dan Remaja, Posyandu dll) belum sebagaimana yang diharapkan karena keterbatasan PLKB.
5. Bidang Komunikasi dan Informatika menghadapi permasalahan:
 - a. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - c. Belum diterapkannya Dokumen Rencana Induk (*master plan*)e-government Kabupaten Klaten secara konsisten ;
 - d. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi ke seluruh wilayah kecamatan ;
 - e. Masih lemahnya koordinasi terkait komunikasi informasi.
 6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menghadapi permasalahan :
 - a. Masih sekitar 30% koperasi dalam kondisi tidak aktif ;
 - b. Hanya sekitar 2-3% koperasi sehat dan 97-98% koperasi cukup sehat dari 70% koperasi dalam kondisi aktif ;
 - c. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha, manajerial dan pengelolaan kelembagaan usaha mikro dan kecil;
 - d. Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing produk usaha kecil dan mikro ;
 - e. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro kecil berbasis klaster ;
 - f. Belum adanya kesepakatan produk unggulan daerah yang menjadi *trademark dan brand image* Klaten;
 - g. Belum optimalnya pengembangan akses sumber daya produktif (modal, pasar dan teknologi informasi).
 7. Bidang Statistik menghadapi permasalahan:
 - a. Belum akurat dan terpadunya data dasar statistik ;
 - b. Belum terintegrasinya pengelolaan data spasial ;
 - c. Belum sinkronnya data kependudukan dengan BPS.
 8. Bidang Persandian menghadapi permasalahan:
 - a. Terbatasnya kapasitas dan jumlah SDM bidang persandian;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung persandian.
 9. Bidang Perpustakaan menghadapi permasalahan :
 - a. Masih rendahnya minat dan tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah (rata-rata sekitar 36-45 orang/hari) ;
 - b. Waktu pelayanan perpustakaan daerah hanya 5 hari kerja ;
 - c. Masih belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan Daerah ;
 - d. Masih rendahnya kesadaran pemerintah desa/kelurahan akan pentingnya budaya dan kesadaran membaca bagi warganya (baru 45 desa dari 401 desa/kelurahan atau baru 11% yang memiliki perpustakaan desa/kelurahan) ;
 - e. Belum dikembangkannya digitalisasi dan *e-library* ;

- f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - g. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan satuan layanan pendidikan (sekolah) ;
 - h. Terbatasnya SDM Pustakawan yang kompeten.
10. Bidang Kearsipan menghadapi permasalahan :
- a. Kurangnya SDM dan sarana prasarana pendukung kerja ;
 - b. Belum optimalnyakesadaran tata kelola kearsipan daerah;
 - c. Belum populernya digitalisasi/aplikasi teknologi informasi.
11. Bidang Energi Sumberdaya Mineral menghadapi permasalahan :
- a. Tidak adanya kewenangan kabupaten terkait ESDM ;
 - b. Belum optimalnya tata kelola pertambangan Golongan C;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan;
 - d. Posisi dilematis kabupaten antara tidak adanya kewenangan dan harus melihat kenyataan dan permasalahan lapangan.
12. Bidang Umum Pemerintahan menghadapi permasalahan sebagai berikut :
- a. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja birokrasi pemda mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja.
 - b. Masih adanya deviasi antara target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja yang dilaksanakan ;
 - c. Masih adanya ketidaksepahaman pendekatan pembangunan antara pihak eksekutif dengan legislatif ;
 - d. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih <10% ;
 - e. Ketergantungan pembiayaan pembangunan terhadap pusat dan provinsi masih sangat besar > 90% ;
 - f. Belum tertibnya pengelolaan aset-aset daerah ;
 - g. Masih kurangnya jumlah dan kapasitas aparatur pengawasan internal;
 - h. Masih belum optimalnya sistem pengawasan internal;
 - i. Masih rendahnya jumlah produk hukum daerah.

4.1.3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Secara umum aspek daya saing daerah ditekankan pada sejauh mana daerah segala potensi yang dimiliki daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya dikelola dan didayagunakan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini letak geografis, sumber daya alam, SDM, regulasi dan hal-hal lainnya dikelola semaksimal mungkin. Aspek ini meliputi 4 (empat) fokus : (1)Kemampuan Ekonomi Daerah; (2)Fasilitas Infrastruktur Wilayah; (3)Iklim Berinvestasi dan (4) Sumber Daya Manusia (SDM).

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur berdasarkan seberapa besar belanja yang dikeluarkan oleh setiap rumah tangga. Secara umum pengeluaran setiap rumah tangga sebesar >Rp.300.000,00/bulan setiap tahun meningkat dan kondisi terakhir sudah > 80%. Hal ini menandakan bahwa

telah terjadi peningkatan taraf hidup walaupun proporsi antara belanja makanan dan non makanan relatif seimbang 49% dan 51%.

Hal lain yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi daerah adalah kepariwisataan dan pertanian. Letak geografis di sepanjang jalur transportasi darat bagian tengah Pulau Jawa serta di tengah antara Kota Wisata Yogyakarta dan Kota Budaya Surakarta dan potensi kepariwisataan daerah yang lengkap (potensi wisata alam, sumber air, budaya, religi dan buatan) apabila dikelola secara terencana, terpadu dan profesional serta menerus akan mampu menjadi sumbangan bagi PAD. Kesuburan tanah yang sudah dikenal sejak jaman kolonial menjadikan sektor pertanian menjadi andalan sebagian besar masyarakat dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah. Secara umum kedua bidang itu memiliki permasalahan.

1. Bidang Pariwisata menghadapi permasalahan :
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;
 - b. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan;
 - c. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
 - d. Belum berkembangnya wisata unggulan sebagai destinasi wisata;
 - e. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
 - f. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal.
2. Bidang Pertanian menghadapi permasalahan :
 - a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan;
 - b. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
 - c. Masih banyaknya jaringan irigasi pertanian kurang baik ;
 - d. Belum berkembangnya sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan berbasis agropolitan;
 - e. Masih lemahnya kapasitas petani dan kelembagaannya ;
 - f. Kurangnya sarana prasarana Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet yang memenuhi standar;
 - g. Terbatasnya SDM Penyuluh Pertanian dan Pengamat Hama;
 - h. Masih kurangnya sarana prasarana perkebunan yang berkualitas pada kawasan penghasil tembakau;
 - i. Belum berkembangnya pemanfaatan tanaman refugia dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - j. Kurang memadainya sarana prasarana inseminasi buatan dan tenaga teknis lapangan yang handal.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Dalam rangka pengembangan wilayah secara merata dan adil maka sektor perhubungan berperan vital. Namun demikian kondisi sekarang Bidang Perhubungan menghadapi permasalahan :

- a. Kurang seimbangnya antara volume kendaraan bermotor dan kapasitas prasarana jalan;
 - b. Kurangnya fasilitas dan penunjang keselamatan lalu lintas ;
 - c. Kurangnya disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas ;
 - d. Belum terpadunya sistem jaringan jalan antar moda ;
 - e. Lemahnya manajemen rekayasa lalu lintas;
 - f. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan;
 - g. Kondisi sub terminal kurang memadai;
 - h. Belum tersedianya terminal barang/bongkar muat barang;
 - i. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - j. Belum optimalnya pengawasan terhadap kelebihan batas muatan.
- C. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus ini terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu: (1) penanaman modal; (2) perdagangan dan (3) perindustrian. Sebagaimana diketahui bahwa penanaman modal atau investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Secara prinsip yang diyakinkan daerah terhadap pemilik modal (investor) bahwa daerah antara lain: (1) Kepastian hukum peruntukan lahan; (2) Menawarkan kemudahan regulasi/insentif; (3) Memberikan insentif pajak sebelum usaha berjalan normal; (4) Menjamin *zero* faktor non teknis; (5) Kesiapan tenaga kerja lokal; (6) Sedikit banyak mampu menyediakan bahan produksi dan (7) Menjamin keamanan.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berusaha maksimal namun kenyataannya masing-masing bidang masih dihadapkan/menghadapi permasalahan.

1. Bidang Penanaman Modal menghadapi permasalahan :
 - a. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi guna promosi potensi dan penawaran ber-investasi di daerah ;
 - b. Belum optimalnya *assessment* dan *deregulasi/insentif pro-investasi* daerah ;
 - c. Terbatasnya lahan peruntukan zona atau kawasan industri ;
 - d. Lahan peruntukan kawasan industri yang direncanakan tidak terlalu diminati investor ;
 - e. Masih banyaknya faktor non teknis.
2. Bidang Perdagangan menghadapi permasalahan:
 - a. Masih banyaknya pasar tradisional milik daerah yang belum di-*revitalisasi* (baru 14 pasar atau 28% yang di-*revitalisasi*);
 - b. Menurunnya minat masyarakat belanja di pasar tradisional ;
 - c. Pengelolaan pasar tradisional masih konvensional ;
 - d. Masih banyaknya produk Usaha Kecil dan Mikro yang memiliki legalisasi (minimal memiliki PIRT) ;
 - e. Masih terbatasnya aparatur dan sarana prasarana kerja ke-*meteorologi*-an;

- f. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar serta pita cukai;
 - g. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Bidang Perindustrian menghadapi permasalahan :
- a. Belum berkembangnya Industri Kecil Mikro berbasis produk unggulan daerah ;
 - b. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM bidang Industri Kecil, Menengah;
 - c. Rendahnya (hanya 4,5%) Industri Kecil Mikro yang memiliki daya saing global ;
 - d. Kurangnya koordinasi pelaku usaha dan pemerintah daerah serta pelaku satu dengan lainnya ;
 - e. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
 - f. Belum semua IKM mebel memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu);
 - g. Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah tidak hanya semata-mata ditentukan oleh adanya sumber daya alam yang strategis, bernilai ekonomi dan melimpah. Fakta menunjukkan bahwa kecerdasan, kapasitas, kompetensi dan ketrampilan masyarakat (sumber daya manusia) walaupun minim sumber daya alam mampu membuat daerah dan masyarakatnya sejahtera.

Hal itu hanya akan terjadi apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dalam sistem tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta adanya aparatur daerah yang berintegritas.

Selain dukungan aparatur, kemajuan dan kemakmuran daerah tidak dapat dilepaskan dari adanya budaya membaca, melek teknologi serta semangat dan budaya kreasi dan inovasi (krenova). Dukungan daerah terhadap apresiasi krenova masyarakat, teknologi tepat guna (TTG) dan semangat membangun jejaring/kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha serta perekayasa ataupun penemu (inventor) sangat diperlukan. Diseminasi dan *Hilir*-isasi hasil-hasil litbang perguruan tinggi dan lembaga litbang akan mengoptimalkan potensi dan proses produksi masyarakat yang sudah berjalan. Walaupun perannya yang sangat strategis namun kenyataannya fokus ini masih menghadapi permasalahan.

1. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menghadapi permasalahan sebagai berikut :
- a. Kurangnya tenaga fungsional guru sekolah dasar negeri dan fungsional teknis lainnya ;

- b. Lemahnya sistem manajemen pengelolaan dan penataan kepegawaian ;
 - c. Belum adanya sistem penilaian antara beban kerja dan hak aparatur yang adil dan proporsional.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menghadapi permasalahan sebagai berikut :
- a. Struktur kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah belum sebagaimana yang diharapkan ;
 - b. Masih minimnya implementasi nyata atas Nota Kesepahaman (MoU) antara daerah dengan perguruan tinggi yang ada ;
 - c. Masih minimnya diseminasi dan *hilir*-isasi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa lembaga penelitian di daerah ;
 - d. Masih belum optimalnya peran Dewan Riset Daerah (DRD) ;
 - e. Masih minimnya tindak lanjut hasil kreatifitas dan inovasi (krenova) masyarakat dan pelajar.
 - f. Belum adanya kompetisi hibah penelitian daerah.

4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi hal penting yang akan berpengaruh di masa datang terhadap perkembangan Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2021. Dengan demikian pada bagian perumusan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang muncul diprioritaskan akan menjadi agenda utama dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten

Kemajuan ilmu dan teknologi mengakibatkan mudahnya koneksitas antara dunia internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif. Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis, adalah sebagai berikut.

A. Lingkungan Internasional

1. Globalisasi Perdagangan dan Jasa

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan MEA, dan ekspor produk mebel harus memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu).

2. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang

internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah kabupaten.

3. Degradasi Lingkungan

Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob) dan pencemaran yang mengakibatkan meningkatnya gas emisi karbon. Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian serta dapat menimbulkan berbagai penyakit

4. Komitmen Internasional

Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah *Millenium Development Goals (MDG's)* yang dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* tentang pembangunan dan Pemberdayaan perempuan, *Hyogo Framework* tentang peredaman bencana, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* tentang perdagangan bebas di kawasan Asean, *Ecolabelling* atau sertifikasi produk dan sebagainya.

B. Lingkungan Nasional

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG's yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1US\$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.

Kemiskinan di Kabupaten Klaten hingga saat ini masih belum ditangani secara optimal. Meskipun pada tahun 2015, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan, tetapi masih menempati peringkat tujuh dari lima belas 14,15% sebagai desa merah di Jawa Tengah. Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Klaten mempunyai dimensi pokok, yaitu: rumah tidak layak huni, kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Pemerintah Kabupaten Klaten bagaimana program pembangunan harus benar-benar difokuskan kepada Rumah Tangga Miskin.

2. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

3. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

4. Bencana Alam

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin, kebakaran dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

5. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM Nasional 2014-2018 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

6. Stabilitas Keamanan dan Ketentraman

Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan. Selain itu isu tentang SARA dan politik perlu diantisipasi dan diwaspadai agar tidak berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Hambatan Perdagangan Antar Daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil

dan menengah adalah ketatnya persaingan kualitas produk untuk menembus segmentasi pasar antar daerah.

8. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Indikator pembangunan gender secara resmi adalah *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu, termasuk akses terhadap pembangunan.

9. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak.

10. Daya Saing Teknologi dan Industri

Kemajuan teknologi yang sangat pesat belum diimbangi dengan kemampuan SDM dalam pemanfaatannya, sehingga daya saing produk industri yang dihasilkan masih kurang mampu bersaing di pasar global.

C. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah

Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2003-2018 secara ringkas, adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan,
2. Pengurangan pengangguran,
3. Pembangunan infrastruktur,
4. Kedaulatan pangan,
5. Kedaulatan energi, dan
6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah.

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten

Mendasari pokok permasalahan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan apabila dianalisa SWOT (*Strength Weaknesses Opportunities Threats*), secara ringkas adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan:

1. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang strategis terletak diantara Yogyakarta-Surakarta akan memungkinkan terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memungkinkan berkembang menjadi kota satelit dan penyanga bagi kebutuhan barang dan jasa.

2. Memiliki sumber daya aparatur yang cukup besar dan memiliki kompetensi dibidangnya.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai.
4. Memiliki jumlah UKM yang sangat besar.
5. Memiliki luas wilayah dan penduduk yang cukup besar serta terbagi menjadi 26 Kecamatan dan 401 Desa/Kelurahan.
6. Memiliki Potensi sumber daya alam termasuk sumber daya pertanian yang besar.
7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah cukup tinggi.
8. Memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundangan dan kebijakan daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah.
9. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetap terpelihara dengan baik.
10. Potensi budaya dan kepariwisataan yang beragam menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor pariwisata.
11. Adanya infrastruktur dasar publik yang cukup memadai dan terbukanya akses ke setiap wilayah.
12. Tersedianya Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025.
13. Tersedianya Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

B. Kelemahan :

1. Masih kurangnya para pelaku UKM yang mampu mengakses sumber daya produktif (modal, teknologi, informasi dan pasar).
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
3. Belum meratanya kualitas pendidikan dan akses pelayanan kesehatan antar wilayah.
4. Belum terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka keruangan/wilayah pembangunan sampai tingkat desa.
5. Masih terbatasnya akses data dan informasi pendukung dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah baik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan.
6. Masih rendahnya IKM dan UKM yang memiliki daya saing.
7. Masih tingginya ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat.
8. Belum optimalnya pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

C. Peluang

1. Adanya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,

pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

2. Adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan penggalian sumber-sumber keuangan dari pajak dan retribusi daerah secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Semakin menguatnya pengintegrasian perekonomian dunia yang ditandai dengan perekonomian global yang memperbesar akses pasar bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Klaten.
4. Terjalannya kerja sama antar daerah dalam Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN akan semakin menciptakan sinergisitas pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah regional di Wilayah Subosukawonosraten yang lebih baik.
5. Terciptanya iklim kondusif atas dasar pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha yang saling menguntungkan akan lebih mendorong tumbuhnya iklim investasi dan mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan memperluas pasar bagi produk barang dan jasa UKM.

D. Ancaman

1. Semakin menguatnya daya saing terhadap produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dari luar Kabupaten Klaten baik dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.
2. Adanya persaingan pasar global dan perdagangan bebas.
3. Semakin intensifnya daerah-daerah lain dalam melakukan kebijakan *deregulasi* dan *debirokratisasi* yang memberikan kemudahan berinvestasi di daerah yang bersangkutan.
4. Fluktuatifnya harga minyak internasional dan pangan yang dapat mengakibatkan kenaikan harga BBM dan impor barang.
5. Fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
6. Adanya keberlanjutan dari krisis keuangan global yang akan berdampak pada sendi-sendi perekonomian nasional.
7. Keluarnya PP 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif yang berupa produk tembakau bagi kesehatan.
8. Adanya pemberlakuan masyarakat ekonomi asean (MEA) akan berpengaruh terhadap persaingan perdagangan produk dan jasa.
9. Adanya ketentuan bahwa untuk ekspor mebel ke Eropa harus dilengkapi dengan dokumen sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Berdasarkan analisis SWOT sebagaimana tersebut di atas, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis paling utama dikarenakan angka kemiskinan di tahun 2017 sebesar 14,15% dan pengangguran (TPT sebesar 4,35%) Kabupaten Klaten masih cukup tinggi sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang secara signifikan sekitar 14% dan 4%.

2. Pemerataan Kualitas Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan ke semua wilayah kecamatan menjadi permasalahan mendasar selain adanya permasalahan kurangnya sarana prasarana yang belum memenuhi standar, perpustakaan sekolah dasar, Ruang UKS, Laboratorium dan kurangnya tenaga pendidik guru kelas berstatus negeri pada satuan pendidikan Sekolah dasar khususnya di wilayah perdesaan dan perbatasan. Selain itu pemenuhan hal-hal tersebut di atas, kebijakan rayonisasi dan pemanfaatan teknologi informasi (*on line*) proses penerimaan peserta didik baru harus menjadi komitmen bersama. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM).

3. Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi daerah terhadap masyarakat khususnya terkait dengan target pencapaian misi I (pertama) RPJMD ini. Dengan demikian maka pemerintah daerah berkewajiban menjamin kesehatan masyarakat dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan dan menjamin pembiayaan asuransi kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai ketentuan.

4. Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

5. Kedaulatan pangan

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun demikian masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan pola pertanian terpadu dengan berbasis pada teknologi. Hal tersebut mengingat potensi pertanian di Kabupaten Klaten cukup besar.

Kedaulatan pangan menjadi isu yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Klaten ke depan, melalui kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode dan ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan

bagi petani dan nelayan kecil penghasil pangan serta pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Dengan demikian diharapkan kedepannya banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasi di Kabupaten Klaten, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli bagi daerah.

6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Konsistensi Tata Ruang

Isu lingkungan hidup di Kabupaten Klaten sama dengan isu nasional yang dihadapi. Pembangunan yang dilakukan sekarang yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya. Secara tidak langsung tindakan ini akan mengakibatkan rusaknya lingkungan dan mengancam pada kelangsungan hidup manusia. Keteledoran manusia dalam mendirikan bangunan dengan tanpa memperhatikan dampak dari usaha atau industri yang akan berlangsung pada bangunan tersebut juga akan merusak lingkungan baik fisik maupun biologis secara perlahan dan tidak langsung, sehingga menghasilkan pencemaran lingkungan. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan akan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali. Berdasarkan alasan inilah maka perlu dibuat sebuah rencana pengelolaan lingkungan demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa kini dan masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, persoalan limbah, pencemaran air, polusi udara, serta penataan ruang.

Selain isu lingkungan yang diuraikan di atas, isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dalam tiga tahun ke depan dengan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Konsep tata ruang di Kabupaten Klaten diterjemahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

7. Pertumbuhan Investasi dan Penanaman Modal

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Kabupaten Klaten tertinggal dibanding kabupaten tetangga kawasan “Subosukawonosraten” dalam menarik investor. Dengan demikian daerah wajib meyakinkan terhadap pemilik modal (investor) bahwa : (1) Ada kepastian hukum peruntukan lahan ; (2) Menawarkan kemudahan regulasi/insentif ; (3) Memberikan insentif pajak sebelum usaha berjalan normal ; (4) Menjamin zero faktor non teknis ; (5) Kesiapan tenaga kerja lokal ; (6) Sedikit banyak mampu menyediakan bahan produksi dan (7) Menjamin keamanan.

8. Kesenjangan (disparitas) Perkembangan Wilayah

Terjadinya kesenjangan (*disparitas*) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/*stagnan*. Hal ini untuk wilayah utara (Wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung) boleh jadi salah satunya disebabkan letaknya berdekatan dengan Gunung Merapi dan untuk wilayah selatan (Kecamatan Cawas, Bayat, Gantiwarno dan Prambanan) boleh jadi disebabkan potensi kegempaan yang berada pada tingkat menengah sehingga tanahnya labil yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan

9. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan HIV/AIDS

Isu kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan guna merealisasikan Kabupaten Klaten Layak Anak menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut boleh jadi disebabkan :masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan nasional harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Selain pergaulan bebas, perubahan gaya hidup dan faktor-faktor lain menyebabkan peningkatan masyarakat Kabupaten Klaten yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Dengan demikian peran insan kesehatan dan relawan sangat diperlukan guna menekan perkembangannya.

10. Penanganan Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur daerah menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian dan menarik minat investor untuk ber-investasi salah satunya adanya infrastruktur yang baik. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan Instruksi Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% APBN/APBD untuk sektor infrastruktur.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “*Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur*”.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “*Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestar*”.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Sejahtera**, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Berketuhanan**, yang dimaksud berkeTuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin pada masyarakat yang agamis.
4. **Cerdas**, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
5. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
6. **Berbudaya**, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan budaya sebagai adat-istiadat.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 adalah: “**MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**”. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

5.2 Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan, keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah

yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa-kota, meningkatnya daya beli masyarakat dengan didukung keunggulan kompetitif dan berdaya saing.

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan dan target tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung pembangunan daerah.

5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.

6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi1: Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

- Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3: Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5: Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7: Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- Misi 8: Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Pemahaman dan pengertian tujuan dan sasaran adalah hasil tahap penetapan rumusan sasaran strategis yang mencerminkan skala prioritas tertinggi di dalam Dokumen RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pencapaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu tujuan sendiri mengandung pengertian sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu atau periode lima tahun. Tujuan ditentukan dengan mengacu visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran akan dicapai selama periode waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

5.3.1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Masyarakat yang cerdas disertai kesehatan yang terjamin dengan tetap mengedepankan budaya ketimuran merupakan sebuah konsep besar yang dimana pemerintah harus memegang peran utama guna mewujudkan keberhasilannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan kemandirian. Pemberdayaan adalah proses tata pelaksanaan pembangunan yang mampu menggiring pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kejuangan, cara mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin dengan tetap bersendi pada budaya ketimuran. Kemandirian adalah lingkup independensi kelompok masyarakat dikarenakan pengembangan kecerdasan yang dimiliki. Dengan demikian akan semakin rendah tingkat ketergantungan kepada pihak lain, untuk mencapai keberhasilan program pembangunan yang telah ditargetkan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Menurunnya persentase penduduk miskin;
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah khususnya tercapainya persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen usia harapan hidup khususnya tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita dan Prevalensi Gizi Buruk;
4. Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
6. Meningkatnya aset budaya tersertifikasi dan
7. Meningkatnya minat baca masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perpustakaan daerah.

Secara umum ditandai dengan masyarakat yang berpendidikan (melek huruf), cakap dan cerdas, sehat, berbudaya sesuai jati diri adat Jawa Mataraman, berjiwa tangguh dan ulet, siap berkompetisi, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

5.3.2. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi faktor kunci dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*goodcleangovernance*). Jalannya roda pemerintahan akan baik dan aspiratif apabila ruang informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan pemerintah terbuka lebar yang diimbangi dengan tanggung jawab yang baik. Aspek transparansi merupakan salah satu elemen pembentuk konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu teori dan mempertimbangkan kondisi *factual* dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan kebijakan yang memberikan ruang komunikasi cukup dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperluas peran masyarakat sebagai unsur pembangun kebijakan dalam memberikan aspirasi dan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien khususnya meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase ASN Perencana yang bersertifikat;
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ditandai diraihnya Opini “*Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*” dari BPK;
3. Meningkatnya produk hukum Perda yang ditetapkan tepat waktu;
4. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dan ketepatan waktu perencanaan daerah;
5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

7. Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
8. Menurunnya tingkat inflasi daerah;
9. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
10. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
11. Meningkatnya pengadaan barang/jasa secara elektronik;
12. Meningkatnya publikasi dan komunikasi kebijakan kepala daerah;
13. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum menggambarkan ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5.3.3. Misi 3: Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal

Masyarakat yang terus bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah dapat dikatakan belum mampu mengarungi samudra persaingan. Oleh karenanya kebijakan ekonomi daerah diharapkan menghasilkan kelompok-kelompok masyarakat yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi inspirasi bagi anggota masyarakat lain dilingkungannya menjadi sebuah masyarakat yang mandiri, memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan mempunyai daya saing kompetitif secara global.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
4. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap PDRB;
5. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor industri;
6. Meningkatnya penerapan produk kreatifitas dan inovasi dalam pembangunan;
7. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing penanaman modal.

Secara umum menggambarkan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah dan sumbangan antar sub sektor terhadap struktur ekonomi dalam PDRB, kondisi pengangguran riil dan respon/tanggapan investor terhadap peluang investasi yang ditawarkan pemerintah daerah.

5.3.4. Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Kebutuhan SaranaPrasarana Dasar Sosial Masyarakat

Ketersediaan ruang terbuka hijau, penanganan persampahan, penyediaan infrastruktur permukiman yang layak dan penataan daya dukung transportasi merupakan komponen lengkap pembangunan infrastruktur dalam

mewujudkan peran pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana masyarakat.

Konsep kesejahteraan kehidupan masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan taraf hidup dari sisi finansial, namun juga terhadap kenyamanan dan keterjaminan pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Permasalahan lainnya yang perlu diselesaikan adalah permasalahan transportasi dan daya dukung. Langkah dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dengan seluruh stake holders akan mempercepat akselerasi pelaksanaan penataan infrastruktur jalan, sehingga memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan masyarakat.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Secara umum menggambarkan kapasitas infrastruktur dan sarana prasarana sosial dasar yang berkualitas guna mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat, sosial budaya dan hubungan antar manusia.

5.3.5. Misi 5: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah

Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan seharusnya tidak dibenarkan berlawanan dengantata ruang serta daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memberikan daya dukung lingkungan yang memadai bagi keberlangsungan aktivitas produktif masyarakat.

Kondisi persampahan yang merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat produksi atau volume sampah bersifat rutin setiap hari. Oleh karenanya diperlukan kebijakan mereduksi volume produksi sampah dari sumber sampah, sehingga pengelolaan persampahan lebih efektif dan efisien. Prinsip tataruang adalah integrasi satu ekosistem lingkungan untuk menjaga keseimbangan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Oleh karenanya diperlukan keterpaduan dalam suatu rencana tata ruang, bukan hanya mendasarkan pada logika infrastruktur dasar melainkan mempertimbangkan pula daya dukung dan daya tampung lingkungan di sekitarnya. Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup.

Untuk itu diperlukan berbagai langkah yang tepat dan terencana untuk tetap membangun sebuah tata ruang yang memiliki daya ungkit ekonomi sebagai upaya pembangunan perekonomian masyarakat, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Dampak dari ketidakberpikahan pada kelestarian ekosistem akan berdampak luas pada kualitas kehidupan masyarakat.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;
2. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana dan meningkatnya kapasitas;
3. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

Secara umum menggambarkan sejauh mana peranan tata ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, menurunnya resiko korban bencana dan terkendalinya sumber daya alam dan energi.

5.3.6. Misi 6: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian

Masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila dan berwawasan kebangsaan, akan memudahkan pencapaian pembangunan manusia seutuhnya. Karakter masyarakat yang mempunyai jiwa gotong royong akan membuat ketentraman kehidupan masyarakat yang baik. Kebijakan pembangunan perlu dilakukan secara utuh baik lahir maupun batin, sehingga tata kehidupan manusia yang dicita-citakan bisa terwujud. Ketentraman dan kesejahteraan kehidupan tercapai dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah maju, namun tetap berpijak pada karakter dan budaya masyarakat ketimuran.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi;
2. Meningkatnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan;
3. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara umum menggambarkan ketercapaian hak-hak masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara.

5.3.7. Misi 7: Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Tuntutan perkembangan jaman mengharuskan kebijakan pemberdayaan kualitas perempuan dan juga peningkatan perlindungan terhadap anak. Terjadinya berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, semestinya disikapi dengan penetapan kebijakan pemerintah terkait langkah-langkah antisipatif dan preventif menghadapi permasalahan tersebut.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan perlindungan perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan anak.

Secara umum menggambarkan kapasitas perempuan serta perlindungan perempuan dan anak guna mengakses berperan dalam pembangunan.

5.3.8. Misi 8: Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik

Terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditentukan guna mewujudkan kepuasan masyarakat merupakan hal pokok yang ingin dicapai atas misi ini. Pelayanan yang optimal di semua sektor akan mencerminkan dukungan pencapaian maksimal hasil-hasil pembangunan yang menjadi kebijakan daerah.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
4. Meningkatnya minat transmigrasi.

Tabel 5.1. menyajikan secara rinci tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat terealisasi dalam rangka ketercapaian setiap misi.

**TABEL 5.1. : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN KLATEN
VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing**

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya										
1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00	55,00
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14	14
	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69	10,15	10,13	10,11	10,09	10,07	10,07
	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7	0,7
a. Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
3. Menurunkan tingkat kemiskinan	Prosentase penduduk miskin	%	14,89	14,46	14,15	14,12	14,10	14,05	14,00	14,00
a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89	89
	persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92	94	96	97	99	100	100

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13	12,9	12,9
4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,1	1,07	1,05	1,03	1,01	0,98	0,96	0,96
a. Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
5. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	Rasio aset budaya tersertifikasi	%	7/92	8/92	9/92	10/92	11/92	12/92	13/92	13/92
	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	36	38	41	44	46	47	48	48
a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	60
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	5	5	5	5	5	30
b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	6	6	6	6	6	36
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10	10	10	10	10	10	60
6. Meningkatkan minat baca masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat	Index	65	65	65	65	70	70	70	70
a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4	5	5	5	5	5	5
II. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih										
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,08	0,18	1,28	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan	%	50,98	50,98	54,90	58,82	62,75	66,67	70,59	70,59
a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70	70	85	85	90	90	85
d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	Index Kepuasan Masyarakat	index	65	65	65	65	70	70	70	70
a. Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	5	5	5	5	5	5	25
3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan	%	20%	27%	33%	40%	47%	53%	60%	60%
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%	100%
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini BPK									
a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3	3
	Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2	3	3	3	3	3
	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)	70 (BB)
b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,1
c. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	80	80	100	85	90	90	90	90
	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	75	80	80	80	80
d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	80	85	88	90	90	90	90	90
e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0		100	100	100	100	100	100

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90	92	94	96	98	100	100
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90	92	94	96	98	100	100
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100	92	94	96	98	100	100
g. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
h. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	90	90	95	95	95	95
III. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal										
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43
a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6	12,6
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	13%	19%	23%	26%	33%	41%	45%	45%
a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TIG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%	27%	35%	42%	50%	58%	58%
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410	21.410	22.460	23.560	24.720	24.720	24.720

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25	130
b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38	19,38
	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5	7	9	11	13	15	15
c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100,00	100,00
d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja									
	PMDN		189	238	397	417	438	460	483	2.433
	PMA		46	294	294	294	294	294	294	1.764
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)									
	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	12,74
PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	14,70	
4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,51	3,94	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,15
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08	1,08
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69	69
b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00	87,30	87,60	87,90	88,20	88,20	88,20
5. Meningkatnya daya saing produk industri daerah	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2	35,2
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50
IV. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat										
1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat										

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81	40,81
b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92	40,76	45,87	47,41	57,52	57,52	57,52
c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	indek	57,71	61,61	65,50	70,01	73,75	74,05	74,40	94,40
V. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah										
1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indek	36,46	41,35	46,24	51,13	56,03	58,47	60,92	60,92
a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	78,94	78,98	79,20	79,60	80,00	80,00
b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46	40,46
	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46	84,46
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03	43,93	48,82	53,71	56,16	58,60	58,60
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks		123	122	121	120	119	119	119
a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
VI. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian										
1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5%	5%	13%	23%	40%	70%	100%	100%

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%	33%	49%	66%	83%	100%	100%
3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
VII. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak										
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	96,42	96,47	96,52	96,57	96,62	96,67	96,72	96,72
a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	60,37
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya	madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik										
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat										
a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078	81,078
b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00	80,00
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi	%	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,20
a. Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan dikaloborasikan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, program lintas OPD dan program kewilayahan.

6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan kepala daerah, diuraikan didalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanaannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang didalam tabel 6.1.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi, dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan arah kebijakan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang menurut Misi yang akan dicapai. Penetapan arah kebijakan untuk mencapai masing-masing misi selama kurun waktu masa berlaku RPJMD, tertuang didalam tabel 6.2.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, meliputi :

1. Program Organisasi Perangkat Daerah

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, adalah merupakan program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis - SKPD dan merupakan program yang telah diselaraskan dengan Program RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 atau Program Kabupaten diselaraskan dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, yang dimaksud adalah beberapa Program Kabupaten yang telah diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta didukung oleh kegiatan beberapa OPD.

3. Program Kewilayahan

Program Kewilayahan merupakan program kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adapun Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk melaksanakan ketercapaiannya didalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021,tertuang secara terinci didalam tabel 6.1. Sedangkan rincian program dengan berbagai indikatornya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta kebutuhan pendanaannya dijabarkan pada tabel 6.3.

**TABEL 6.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KLATEN**

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
I.	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas,		
	1 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitin oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)
	5 Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.
	3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama
III.	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
			Meningkatkan pemantauan bidang pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan		
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
VI.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkara konsistn

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VII.	Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak
VIII.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

**TABEL 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KLATEN**

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
MISI - 1						
1.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun
	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik sekolah dasar	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik sekolah dasar	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik SMP	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD
2.	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
		Penyusunan Perbub Kesehatan Ibu dan anak	Sosialisasi Perbub Kesehatan ibu dan anak	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA
	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar
		Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur
		Fasilitasi pembentukan Pos pembinaan Terpadu Penyakit tidak menular (Posbindu PTM)	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu
	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia
	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita
	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita
	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita
	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader
	Penyusunan Perda HIV	Sosialisasi Regulasi/Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3.	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
4.	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah
	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional
	3. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, situs dan benda cagar budaya	2. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, situs dan benda cagar budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya
	Sinergitas program kegiatan olahraga dengan dinas terkait dan organisasi keolahragaan	Inventarisasi dan pemetaan cabang olahraga potensial	Pembinaan cabang olahraga potensial	Pembibitan dan pembinaan atlet usia dini	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif
	Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja	Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme	Peningkatan prestasi pemuda	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan
5.	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa
	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan
	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan
MISI - 2						
1.	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial
	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional
	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis
	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS
			Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya					
	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat					
	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS					
	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi					
2.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah					
	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3.	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah					
4.	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi					
	Mengakuisisi arsip milik daerah					
	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah					
	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa					
5.	Pembinaan aparat pemerintahan desa					
	-	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa				
	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa					
6.	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
7.	Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel
	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah
	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah
8.	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
9.	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air
	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan
10.	Menyusun kebijakan terkait dengan kerukunan beragama, meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Menyusun kebijakan terkait dengan kerukunan beragama, meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
11.	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
	Penguatan terhadap pengawasan internal sinergi pemeriksanaan dan pengawasan intern	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal
MISI - 3						
1.	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein per kapita	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular
	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah
	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas
	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular
2.	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Fasilitasi pembentukan LED BUMDes	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian
	Fasilitasi kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan
3.	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan
	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan
4.	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal
	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan
	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat
5.	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat
6.	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal	Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga atas pengimplementasian Rencana Umum Penanaman Modal	Meriview Rencana Umum Penanaman Modal	Meningkatkan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha	Memantapkan peningkatan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha	Memantapkan peningkatan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha
	Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan fungsi Koordinasi antar lembaga atas pengimplementasian Rencana Umum Penanaman Modal	Mengembangkan strategi promosi yang terarah, fokus, dan inovatif	Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala nasional	Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala nasional
		Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga dalam rangka pengembangan potensi daerah	Menyusun profil potensi dan peluang investasi			
7.	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja
	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
8.	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri					
	MISI - 4					
1.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah
	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan					
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten
3.	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan					
	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan					
4.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat
5.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
6.	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
MISI - 5						
1.	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan
2.	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan
	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri
	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil					
	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat
	Peningkatan pengelolaan limbah B3					
	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan					
	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan
	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten
	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim					
				Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)	Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)	Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)
	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat
	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Peningkatan peran serta lembaga/sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan
	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat
3.	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana
MISI - 6						
1.	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Delanggu	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di wilayah rentan permasalahan sosial eks Tubup Kota	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Jatinom	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Pedan	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Gondang Winangun	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Gondang Winangun
2.	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik
3.	Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM
	-	Penyusunan Regulasi, sosialisasi dan pembentukan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pembinaan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Penguatan kapasitas posyandu dan KPMD	Penguatan kapasitas posyandu dan KPMD	Penguatan kapasitas posyandu, KPMD dan LK Lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya
4.	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral
5.	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai
	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat					
	MISI - 7					
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					
	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
2.	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	MISI -8					
1.	Menyusun Standar Pelayanan	Penyempurnaan Standar Pelayanan	Mengembangkan pelayanan perizinan on line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line
2.	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan
	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)					
	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)					
	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan
3.	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik
4.	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi					

TABEL 6.3. : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN KLATEN

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN				392.443.275		659.188.495		606.672.769		751.634.372		688.285.150		699.260.096				
I. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya																		
1.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,97		12,97		12,97		12,97		12,97		12,97		
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,23		8,23		8,23		8,23		8,23		8,23		
a.	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00		48,00		50,00		52,00		55,00		55,00		
		Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		
1)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	48.430	48.025	3.528.000	43.027	1.567.800	43.328	1.062.800	43.631	1.169.080	43.937	1.285.988	44.244	1.414.587	44.244	PELAKSANA URUSAN PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,19	92,37		78,61		92,59		92,79		92,99		93,19		93,19	
2)	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	94,53	105,23	24.330.200	97,45	23.688.000	97,65	14.743.000	97,85	16.217.300	98,05	17.839.030	98,25	19.622.933	98,25	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	87,58	97,57		90,93		91,13		91,33		91,53		91,73		91,73	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	81,60	91,26		86,84		87,04		87,24		87,44		87,64		87,64	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,94	72,77		68,22		68,42		68,62		68,82		69,02		69,02	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,64	92,43		88,28		88,48		88,68		88,88		89,08		89,08	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,03		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01		0,01	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,10	0,08		0,23		0,18		0,13		0,08		0,03		0,03	
		Angka Kelulusan SD/MI	%	97,78	99,34		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07	
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	95,55	97,73		98,11		98,13		98,15		98,17		98,19		98,19	
3)	Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,78	99,57	1.235.950	99,62	990.000	99,72	245.000	99,73	269.500	99,74	296.450	99,75	326.095	99,75	
4)	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	86,42	87,83	1.771.800	76,97	765.000	79,97	800.000	82,97	880.000	86	968.000	89	1.064.800	89	
		Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,08	98,76		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	96,58	96,78		93,55		93,75		93,95		94,15		94,35		94,35		
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 11	1 : 12		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		
5)	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	99,78	99,57	270.000	99,62	220.000	99,72	220.000	99,73	242.000	99,74	266.200	99,75	292.820	99,75		
6)	Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	96,64	92,43	891.000	88,28	623.176	88,78	1.305.000	89,28	1.435.500	89,78	1.579.050	90,28	1.736.955	90,28		
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Tahun	71,81	76,59		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		
a.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	kasus	15	18		18		17		16		15		14		14		
	Menurunnya Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69		10,15		10,13		10,11		10,09		10,07		10,07		
	Menurunnya angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09		1,69		1,67		1,65		1,63		1,61		1,61		
	Menurunnya prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89		0,73		0,73		0,72		0,71		0,7		0,7		
1)	Upaya Kesehatan Masyarakat	%	91,72	92,84	2.112.884	92,85	5.098.552	97	6.026.200	98	4.505.000	99	7.300.000	100	7.400.000	100		PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	%	96,3	96,98		97,2		98		99		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	95,72	97,59		97,57		98		99		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	90,79	94		95,25		96		97		98		99		99		
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,96	96,04		99,67		99,2		99,4		99,6		100		100		
	Cakupan BBLR	%	5,22	5,25		5,14		5,10		5,06		5,02		5,00		5,00		
	Cakupan Anemia Wanita Usia Subur	%	-	-		-		35		33		30		28		28		
2)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	-	20	430.000	30	560.000	50	689.000	70	670.525	90	766.000	100	766.000	100		
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	-	10		30		70		90		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	70,44	81,88		99,65		100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	56,7	60		70		80		90		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderit Diabetis mellitus	%	76	30		40		50		70		90		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Gangguan jiwa berat	%	-	70		80		90		100		100		100		100		100
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	12	27,48		64,81		75		80		90		100		100		100
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	80	100		100		90		100		100		100		100		100
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	90	98,7		95,08		92,5		93		95		95		95		95
	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98	98,8		98,72		98		98		98		98		98		98
3)	Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	95,83	96	5.369.285	97	2.836.251	98	4.913.243	99	4.815.000	100	4.919.004	100	5.025.254	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
4)	Pengawasan Obat dan Makanan	%	50	50	52.000	50	50.000	55	55.000	58	130.000	100	58.000	100	58.000	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100		100		100		100		100		100		110		110
5)	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	83.720	100	141.000	100	156.500	100	155.000	100	180.000	100	190.000	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	1	4		4		5		7		9		11		11		11
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	74	75,2		75,4		75,5		75,7		80		80,2		80,2		80,2
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	8	6		8		14		20		24		28		28		28
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	42	42		44		47		49		51		53		53		53
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	80	80		100		100		100		100		100		100		100
6)	Perbaiki Gizi Masyarakat	%	100	100	61.500	100	60.000	100	135.000	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat	%	73,59	81,6		72		79		80		81		82		82		82
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	26,1	27,6		27,2		27,3		27		26,8		26,6		26,6		26,6
	Cakupan Balita Stunting	%	8,4	10,9		10,5		10,8		10,5		10,2		10		10		10

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Cakupan Balita Underweight	%	16,1	19,1		18		18,3		18,1		18		18		18		18
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	1,69	1,38		1,13		2,8		2,5		2,3		2,0		2,0		2,0
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	-	81,4		81,6		85		85		85		85		85		85
7)	Pengembangan Lingkungan Sehat																	
	Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)	%	14	19,95	1.173.836	32,92	571.656	100	963.540	100	995.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	-	-		26,342		25		30		40		50		50		50
8)	Standarisasi Pelayanan Kesehatan																	
	Akreditasi Puskesmas	%	-	20,59	4.200.000	47,06	70.000	32,35	50.000	20,59	100.000	47,06	60.000	32,35	60.000		60.000	
9)	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	5	9.114.222	5	9.060.000	5	9.311.222	5	9.680.730	5	16.000.000	5	16.000.000		16.000.000	5
10)	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya																	
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,28	0,29	16.471.016	0,29	17.537.000	0,29	8.163.389	0,29	37.441.856	0,29	18.000.000	0,29	18.000.000		18.000.000	
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,23	0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22
11)	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata																	
	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,34	1,34	0	1,38	0	1,38	200.000	1,38	2.540.000	1,38	10.000.000	1,38	10.000.000		10.000.000	1,38
b.	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakit oleh masyarakat dan menurunnya angka kemalitan di Rumah Sakit																	
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62
1)	Program Pelayanan Kesehatan																	
	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	14,7%	52,55%	72.448.000	42,04%	69.447.669	62%	37.000.000	65%	46.600.000	70%	46.000.000	70%	47.000.000		47.000.000	70%
	NDR (Net Death Rate) angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	9,5 %	25%		13,74 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	56,8 %	28%		37,21%		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %
3.	Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS																	
	Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7		13,5		13,3		13,1		13		12,9		12,9		12,9
a.	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM																	
	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79		81		83		85		87		89		89		89
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92		94		96		97		99		100		100		100
	Prosentase penduduk miskin	%	14,89	14,46		14,15		14,12		14,10		14,05		14,00		14,00		14,00

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17
1) Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	94	95	1.143.000	96	1.167.689	97	1.192.911	98	1.718.000	99	1.755.109	100	6.976.802	46,78	PLAKSANA URUSAN SOSIAL
2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,1	5,3	654.350	24	668.484	26	682.923	28	850.000	30	868.360	32	4.144.315	32	
3) Pembinaan para penyandang disabilitas, trauma, dan korban bencana	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	18	20	50.000	22	50.000	24	51.080	26	200.000	28	204.320	30	555.418	30	
4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	465.900	100	475.963	100	486.244	100	863.600	100	507.477	100	2.950.770	100	
4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,1	1,07		1,05		1,03		1,01		0,98		0,96		0,96	
a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3		2,18		2,16		2,14		2,12		2,1		2,1	
1) Program Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	75,9	78,7		64,93	1.553.000	64,97	8.029.000	65	8.510.000	65,03	8.625.000	65,06	8.710.000	65,06	PELAKSANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	5,5	5,5		5,5		5,3		5,1		4,98		4,95		4,95	
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	14,3	10,13		9,3		9		8,97		8,94		8,91		8,91	
2) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old)	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	41	40	10.500	39	10.500	37	14.500	35	35.000	33	45.000	31	55.000	31	
3) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri	Persentase peserta KB mandiri	%	32,58	33,58	236.429	34,08	246.500	34,58	285.000	35,08	300.000	35,58	325.000	36,08	335.000	36,08	
	persentase IMP terbentuk	%	0	0		0		100		100		100		101		100	
	Persentase BKB aktif	%	66	70		75		80		85		90		100		100	
	Persentase BKR aktif	%	55	65		75		80		85		90		100		100	
	Persentase BKL aktif	%	70	75		80		85		90		95		100		100	
	Persentase UPPKS aktif	%	45	50		60		70		80		90		100		100	
5. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	Rasio aset budaya tersertifikasi	%	7/92	8/92		9/92		10/92		11/92		12/92		13/92		13/92	
	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	36	38		41		44		46		47		48		48	
a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10		10		10		10		10		10		60	
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5		5		5		5		5		5		30	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17
1) Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	60	64	25.000	66	450.000	66	550.000	69	810.000	69	835.000	72	900.000	72	PELAKSANA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina	%	15	0		15		20		20		25		25		25	
2) Peningkatan Prestasi dan Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	2	2	150.000	15	160.000	0	0	25	250.000	20	100.000	25	200.000	25	
b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6		6		6		6		6		6		36	
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10		10		10		10		10		10		60	
1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	2.424.000	6	3.558.000	6	2.121.000	6	2.660.000	6	2.850.000	6	2.850.000	6	PELAKSANA URUSAN KEBUDAYAAN
2) Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	8	60.000	9	165.000	10	110.000	11	110.000	12	110.000	13	110.000	13	
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	5	0	5	100.000	5	125.000	5	125.000	5	135.000	5	135.000	30	
6. Meningkatkan minat baca masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat	Index	65	65		65		65		70		70		70		70	
a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4		5		5		5		5		5		5	
1) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kenaikan Jumlah Kunjungan Masyarakat	Orang	7.673	8.000	253.400	8.500	452.800	9.000	640.847	9.500	690.000	10.000	740.000	10.000	760.000	10.000	PELAKSANA URUSAN PERPUSTAKAAN
II. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																	
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02		81,29		82,06		84,07		87,36		87,36		87,36	
	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,08	0,18		1,28		1,03		1,03		1,03		1,03		1,03	
	Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan	%	50,98	50,98		54,90		58,82		62,75		66,67		70,59		70,59	
a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02		81,29		82,06		84,07		87,36		87,36		87,36	
1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti lulus uji kompetensi	%	6	0,62	1.187.446	0,65	3.317.600	0,51	5.365.000	3,58	6.240.000	3,62	6.140.000	3,62	7.490.000	3,62	PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN
2) Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani	%	27	13	1.763.750	57,14	2.249.530	59,43	2.666.655	33,06	2.943.000	31,06	3.004.000	29,07	3.040.000	29,07	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17		
b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP		WDP		WDP		WDP		WDP		WTP		WTP			
1) Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,14	17,61	8.663.630	50,30	10.839.353	7,24	10.903.596	7,34	11.139.114	7,44	12.674.700	7,54	12.949.741	7,54	12.949.741	7,54	PELAKSANA URUSAN KEUANGAN
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	51,6	51,6		51,6		52,5		53,0		53,5		53,9		53,9		53,9	
	Persentase penyerapan belanja daerah	%	84,0	85,0		81,0		82,0		83,0		84,0		85,0		85,0		85,0	
c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70		70		85		85		90		90		85		85	
1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	18.591.300	Ada	18.992.872	Ada	35.577.711	Ada	35.796.862	Ada	37.231.050	Ada	37.231.050	Ada	37.231.050	Ada	
	Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Jumlah produk Pembentukan Perda	Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama	15	23		23		28		22		22		22		22		22	140
	Jumlah produk pengawasan DPRD	rekomendasi	14	14		14		14		14		14		14		14		14	84

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Jumlah Produk Perda tentang anggaran pemerintahan daerah	Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	
d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1) Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	1.930.000	Ada	1.809.150	Ada	2.045.917	Ada	2.120.000	Ada	2.200.000	Ada	2.300.000	Ada	PELAKSANA URUSAN PERENCANAAN	
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	%	85	90		95		95		100		100		100		100		
	Penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD	%	85	90		95		95		100		100		100		100		
2) Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah klaster UKM yang telah ditetapkan	klaster	11	11	560.000	11	470.000	11	525.000	11	400.000	11	450.000	11	500.000	11		
	Jumlah produk unggulan daerah yang telah ditetapkan	PUD	0	0		7		7		7		7		7		7		
	Kontribusi dana CSR terhadap pembangunan	%	2,06	4,8		1,45		1,41		1,76		1,85		2,00		2,00		
	Ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
3) Program perencanaan sosial dan budaya	Ketersediaan data dan informasi di bidang sosial dan budaya	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	730.000	Ada	590.000	Ada	350.000	Ada	400.000	Ada	450.000	Ada	500.000	Ada		
	Jumlah KKN Perguruan Tinggi yang dikoordinasikan	PT	4	4		6		7		7		8		10		10		
	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	52 SKPD	52	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52		
	Pengembangan Pendidikan Untuk Semua/ PUS	2 SKPD & 26 KEC	28	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28		
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/ Nangkis	52 SKPD	52	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/ GAKY	2 kegiatan	2	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2
4)	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	408.850	Ada	675.000	Ada	330.000	Ada	400.000	Ada	450.000	Ada	500.000	Ada	Ada
		Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	Ada
2.	Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kearsipan	index	65	65		65		65		70		70		70		70	
a.	Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	5		5		5		5		5		5		25	
1)	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kenaikan Jumlah Koleksi Arsip	buah	68.700	5.500	172.371	6.000	180.250	6.500	190.000	7.000	352.500	7.500	400.000	8.000	450.000	8.000	PELAKSANA URUSAN BIDANG KEARSIPAN
2)	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	OPD	10	10	10.000	14	10.000	15	20.000	30	150.000	30	150.000	35	200.000	35	
3.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan	%	20%	27%		33%		40%		47%		53%		60%		60%	
a.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%		31%		46%		72%		87%		100%		100%	
1)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	13%	13%	137.003	35%	1.444.270	47%	610.000	77%	6.665.000	89%	3.505.000	100%	4.480.000	100%	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2)	Program Tata Kelola Pemerintah Desa	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	15%	15%	501.721	31%	497.405	46%	900.000	72%	1.500.000	87%	1.680.000	100%	1.795.000	100%	
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini BPK																
a.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	level	1	2		2		2		3		3		3		3	
		Level Kapabilitas APIP	level	2	2		2		3		3		3		3		3	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53,01 (CC)		59 (CC)		64 (B)		66(B)		68(B)		70 (BB)		70 (BB)	
1)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa	%	52,3	52,3	3.073.345	65,5	3.139.729	50,0	5.500.000	50,0	5.500.000	50,0	6.000.000	74,5	6.000.000	74,5	PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjut	%	50	60		65		70		75		80		85		85	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase APIP yang tercukupi kebutuhan pengembangan profesi	%	0	0	0	0	0	16,1	450.000	17,2	450.000	17,9	450.000	18,5	450.000	18,5		
2)	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	%	60	60	0	70	0	75		80		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
3)	Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Nilai	0	0	0	0	0	60	75.000	70	100.000	75	100.000	80	100.000			
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	71,36	79,14		79,94		80,7		81		81,5		82		82		
b.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Skor	2,6	2,7		2,8		2,9		3		3,05		3,1		3,1		
1)	Peningkatan kinerja kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	100	385.000	100	695.000	100	695.000	100	420.000	100	440.000	100	500.000	100		SEKRETARIAT DAERAH
2)	Peningkatan Kerjasama daerah	%	10	10	60.000	15	125.000	15	150.000	15	155.000	15	160.000	15	170.000	85		
3)	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pilar	50	50	50.000	50	110.000	50	400.000	50	410.000	50	425.000	250	425.000	250		
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakar	obyek	50	50		50		50		50		50		50		250		
4)	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan	%	60	65	60.000	70	80.000	80	90.000	90	90.000	100	100.000	100	100.000	100		
5)	Pengembangan komunikasi informatika mass media	%	32,2	32,2	425.000	52,2	285.000	52,2	905.000	53,6	6.240.000	55,08	8.275.000	56,5	10.310.000	56,5		PELAKSANA URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa	%	15	30		46		61,5		73		84,6		100		100		
	Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-government	%	10	10		14		40		60		80		100		100		
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor						54		60		65		70		70		
6)	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	dokumen	1	1	45.000	1	155.000	4	155.000	4	190.000	4	200.000	4	200.000	4		PELAKSANA URUSAN STATISTIK
7)	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Pembangunan Kecamatan	%	90	90	897.000	60	1.300.000	65	1.300.000	66	1.690.000	68	1.820.000	69	1.300.000	69		KECAMATAN
	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	95	80		60		65		70		70		70		70		
	Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu	%	90	90		90		90		90		90		90		90		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	%	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
8)	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Pemerintahan Kecamatan	%	60	60	1.170.000	50	1.170.000	70	1.326.000	75	1.430.000	75	1.430.000	80	1.560.000	80	80	
	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	60	60	1.170.000	50	1.170.000	70	1.326.000	75	1.430.000	75	1.430.000	80	1.560.000	80	80	
	Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	50	80	80	80	80	80	83	83	85	85	85	85	85	85	85	90
	Persentase kelembagaan (BPD, LPM/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
9)	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Kemasyarakatan Kecamatan	jumlah kejadian	40	41	2.080.000	20	2.080.000	15	2.197.000	15	2.210.000	15	2.210.000	15	2.340.000	15	15	
	Angka kriminalitas	jumlah kejadian	40	41	2.080.000	20	2.080.000	15	2.197.000	15	2.210.000	15	2.210.000	15	2.340.000	15	15	
	Jumlah penerima beras sejahtera (Rastra)	KK	5552	5552	5552	5235	5235	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238
	Jumlah warga penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	orang	3104	3029	3029	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714
	Jumlah warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)	orang	31315	31268	31268	31268	31268	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527
	Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	KK	1354	1338	1338	2286	2286	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273
c.	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	%	80	80	80	100	100	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	80	80	80	100	100	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	60	70	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1)	Penataan peraturan perundang undangan	%	100	100	1.177.526	100	1.843.000	100	2.970.000	90	2.955.891	90	3.000.700	90	3.000.700	90	90	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase raperda yang terselesaikan	%	100	100	1.177.526	100	1.843.000	100	2.970.000	90	2.955.891	90	3.000.700	90	3.000.700	90	90	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perda yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	90	90	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Persentase perkara yang terselesaikan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	100	113	113	108	108	113	113	77	77	90	90	90	90	90	90	90
2)	Peningkatan pelayanan bantuan hukum	%	2	4	417.560	4	552.494	6	438.000	6	722.395	4	794.634	4	794.634	4	4	
	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	2	4	417.560	4	552.494	6	438.000	6	722.395	4	794.634	4	794.634	4	4	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%																
1) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100,00	100	619.220	100	690.498	100	702.464	100	850.754	100	935.829	100	1.029.412	100	1.029.412	SEKRETARIAT DAERAH
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100		100
e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0			100		100		100		100		100		100		100
1) Peningkatan koordinasi layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditayangkan	%	0			100	211.963	100	355.416	100	480.000	100	500.000	100	550.000	100	550.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	0			100		100		100		100		100		100		100
	Analisis sajian/ penyebab kegagalan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Ada/ Tidak ada	0			Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada								
f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90		90		90		90		90		90		90		90
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90		90		90		90		90		90		90		90
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100		100		100		100		100		100		100		100
1) Penyampaian pesan dan informasi kepala daerah	Media sosial	Pesan	0	360	488.000	360	680.000	420	654.000	420	654.000	480	760.000	480	480.000	2520		SEKRETARIAT DAERAH
	Media papan ruang	Agenda	100	120		120		140		140		160		160		840		
	Media pemerintah	Berita	100	120		120		180		180		240		240		1080		
	Media massa	Berita	100	120		120		180		180		240		240		1080		
	Dokumentasi kegiatan kepala daerah	Dokumen	100	120		120		140		140		160		160		840		
	Sambutan	Naskah	420	480		480		480		480		480		480		2880		
2) Fasilitasi keprotokolan kepala daerah	Acara resmi dan kenegaraan	Agenda	125	150	0	200	55.000	200	176.100	200	230.000	225	250.000	225	275.000	1200		
3) Kemitraan dengan insan kehumasan dan pers	Pers rilis	Agenda	120	240	786.000	240	786.000	240	972.000	240	972.000	240	985.000	240	985.000	1440		
	Iklan	Pesan	36	36		36		48		48		48		48		264		
	Fasilitasi insan media	Agenda	4	6		6		12		12		15		15		66		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17		
g. Meningkatkan fasilitasi dan pengawasan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)		4 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)			
1) Peningkatan fungsi koordinasi bidang SDA, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah	Persentase peningkatan Pendapatan BUMD	%	6,23	2	500.825	2	897.368	2	743.000	2	1.016.000	2	1.112.000	2	1.140.000	2		SEKRETARIAT DAERAH	
	Alokasi pupuk bersubsidi	Ton	59.750	57.530		54.350		63.450		88.035		88.035		88.035		88.035		88.035	
	Debitur penerima KUR	Orang	6.650	32126		28.034		30.534		33.034		35.534		38.034		38.034		38.034	
h. Meningkatkan koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90		90		90		95		95		95		95		95	
1) Kesejahteraan sosial, kesehatan kependudukan dan keluarga berencana	Persentase kenaikan penanganan lanjut usia (lansia)	%	0	10,95	80.226	0	52.226	2,75	90.745	2,74	116.000	4,12	124.000	6,84	137.000			SEKRETARIAT DAERAH	
III. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal																			
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39		5,4		5,41		5,42		5,43		5,43		5,43		5,43	
a. Meningkatkan ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07		12,15		12,25		12,3		12,4		12,6		12,6		12,6	
1) Peningkatan Kinerja Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	91,71	92	900.000	92,25	1.000.000	92,5	1.435.000	92,75	1.335.000	93	1.335.000	93,25	1.335.000	93,25	1.335.000	93,25	PELAKSANA URUSAN PANGAN
2) Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produktifitas padi	(kwt/ha)	63,97	63,98	9.521.359	63,99	10.020.000	63,99	6.492.000	64	10.807.000	64,01	10.900.000	64,01	10.925.000	64,01	10.925.000	64,01	
3) Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi tembakau rajang	(ton)	815	815	2.388.910	1.037	2.490.500	1.087	2.985.000	1.091	3.218.000	1.092	3.348.000	1.092	3.373.000	1.092	3.373.000	1.092	PELAKSANA URUSAN PERTANIAN
	Produksi tembakau asepan	(ton)	1.164	1.038		808		952		1.167		946		946		946		946	
4) Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi sapi	(ekor)	99.438	93.788	330.000	97.954	534.000	104.450	2.125.000	108.628	2.125.000	112.973	2.125.000	117.492	2.125.000	117.492	2.125.000	117.492	
	Produksi daging sapi	(ton)	2.140	2.289		2.450		2.621		2.805		3.001		3.211		3.211		3.211	
5) Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	(ton)	27.831	28.660	2.528.295	29.515	2.198.000	30.396	1.971.000	31.302	2.483.000	31.467	2.483.000	31.467	2.483.000	31.467	2.483.000	31.467	PELAKSANA URUSAN PERIKANAN
	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/ tahun)	13	15,14		17,2		18,72		19,91		20,41		20,41		20,41		20,41	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	13%	19%		23%		26%		33%		41%		45%		45%		
a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%		27%		35%		42%		50%		58%		58%		
1) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	7%	7%	389.371	29%	217.504	46%	427.000	64%	591.000	82%	704.000	100%	875.000	100%		PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	14%	29%	142.102	43%	144.560	51%	225.000	58%	300.000	64%	370.000	70%	450.000	70%		
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,51		0,51		0,52		0,52		0,53		0,53		0,53		
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39		5,4		5,41		5,42		5,43		5,43		5,43		
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410		21.410		22.460		23.560		24.720		24.720		24.720		
a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10		20		25		25		25		25		130		
1) Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	%	10	10	195.000	10	290.000	10	500.000	10	630.000	10	720.000	10	720.000	60		PELAKSANA URUSAN PARIWISATA
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan wisalawan	%	5	60	378.000	70	1.000.000	70	635.000	70	1.010.000	70	1.095.000	70	1.095.000	410		
	Rata - rata lama kunjungan wisatawan	hari	0,5	1		1		1		1		1		1		1		
3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	45	45	380.000	45	5.560.000	45	3.934.800	45	5.220.000	45	5.350.000	45	5.350.000	45		
b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74		18,86		18,94		19,12		19,37		19,38		19,38		
	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5		7		9		11		13		15		15		
1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	unit usaha	54.916	54.941	150.000	54.966	250.000	55.016	350.000	55.066	350.000	55.091	350.000	55.141	350.000	55.141		PELAKSANA URUSAN KOPERASI DAN UNIT USAHA MENENGAH
2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	UMKM	15	5	250.000	55	450.000	105	650.000	106	650.000	105	650.000	105	650.000	494		
3) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	72,20	72,52	75.000	80,07	175.000	80,20	250.000	80,18	250.000	80,59	250.000	80,97	250.000	80,97		
	Pertumbuhan koperasi	unit	946	962		883		894		908		917		925		925		
	Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	%	4,39	4,37		7,07		9,76		11,68		13,53		16		16		
4) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0,10	0,11	50.000	0,13	100.000	0,13	430.000	0,14	800.000	0,15	800.000	0,15	800.000	0,90		PELAKSANA URUSAN PERDAGANGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase cakupan pelayanan UTTP	%	0	0		0		16,6		35		50		75		75		
5) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	30,61	2,041	1.900.000	4,082	16.074.000	4,082	11.550.000	4,082	11.550.000	4,082	11.550.000	4,08	11.550.000	53,06		
	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0,72	0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		
	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,5	1,51		1,52		1,54		1,56		1,58		1,75		1,75		
6) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	66,67	72,22	50.000	58,96	50.000	61,95	50.000	65,65	100.000	69,56	100.000	73,16	100.000	73,16		
c. Meningkatkan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	-	63,64		72,73		81,82		86,36		100,00		100,00		
1) Program penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	29	20	250.000	22	250.000	25	400.000	30	400.000	30	400.000	35	500.000	35	PELAKSANA URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	7	10		14		16		18		19		22		22		
d. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja																	
	PMDN		189	238		397		417		438		460		483		2.433		
	PMA		46	294		294		294		294		294		294		1.764		
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)																	
	PMDN	%	1,75	1,75		1,81		1,98		2,20		2,50		2,50		12,74		
	PMA	%	2,25	2,25		2,40		2,45		2,50		2,55		2,55		14,70		
1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)			25.525		50.636		158.500		570.000		580.000		640.000			PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL	
	PMDN (dim ribu Rp)	Rp	89.208.500	89.208.500		90.823.174		92.621.473		94.659.145		97.025.624		99.451.264		563.789.180		
	PMA (dim ribu US\$)	US\$	11.278,80	11.278,80		11.549.491		11.832.454		12.128		12.438		12.755		23.430.544		
	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)																	
	PMDN	investor	12	12		13		14		15		16		17		87		
	PMA	investor	5	5		5		5		5		5		5		30		
4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,51	3,94		4,35		4,30		4,25		4,20		4,15		4,15		
a. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor kelenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99		1,01		1,03		1,05		1,07		1,08		1,08		
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76		69,51		69		69		69		69		69		
1) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	50	52	3.100.500	54	3.490.550	56	2.904.605	58	3.195.066	60	3.514.572	62	3.866.029	62	PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN	
2) Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	24,74	25,00	2.725.000	25,10	3.159.500	25,20	3.428.450	25,30	3.768.295	25,40	4.142.125	25,50	4.553.337	25,50		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00		87,30		87,60		87,90		88,20		88,20		88,20		
1) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	36,36	36,50	575.000	37,00	632.000	37,50	325.490	38,00	358.039	38,50	393.843	39,00	433.227	39,00		PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	‰	0,75	0,7		0,68		0,66		0,64		0,66		0,68		0,68		
5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59		0,59		0,60		0,61		0,62		0,63		0,63		
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73		34,76		34,86		34,98		35,2		35,2		35,2		
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50		4,50		5,50		6,50		7,50		7,50		7,50		
1) Pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	5,00	5,40	2.217.020	5,80	2.615.000	6,20	1.650.125	6,60	1.440.000	7,00	2.215.000	7,40	2.215.000	7,40		PELAKSANA URUSAN PERINDUSTRIAN
2) Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	3,00	3,20	75.000	3,40	950.000	3,60	1.100.000	3,80	1.225.000	4,00	625.000	4,30	625.000	4,30		
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	9,50	10,00		10,50		11,00		11,50		12,00		12,50		12,50		
IV. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat																		
1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat																		
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45		33,30		35,05		37,19		38,96		40,81		40,81		
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,51	56,25	55.226.452	61,15	185.120.000	63,94	215.455.544	66,93	225.515.225	69,66	234.700.077	72,52	244.322.357	72,52		PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	angka	0,000595683	0,000592		0,000590		0,000587		0,000584		0,000582		0,000579				
2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	20,00	22,20	10.000.000	24,26	12.000.000	26,00	11.000.000	28,00	11.500.000	30,00	12.000.000	32,00	12.000.000	32,00		
3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	13,93	12,89	16.986.343	14,49	19.410.000	15,20	22.029.824	16,63	24.105.933	17,21	24.936.376	17,92	25.974.431	17,92		
b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92		40,76		45,87		47,41		57,52		57,52		57,52		
1) Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Terminal Bis / Terminal Penumpang	unit	9	9	2.598.466	9	7.070.870	9	5.839.927	9	10.200.000	9	14.575.000	9	14.575.000	9		PELAKSANA URUSAN PERHUBUNGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17			
	Jumlah Terminal barang	unit	0	0		0		0		0		1		1		1				
	Prosentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	22,07	27,85		31,53		33,88		36,96		40,03		40,03		40,03		40,03		
	Jumlah Simpang ATCS	simpang	0	0		0		3		5		8		8		8		8		
	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	72	76		82		85		86		87		87		87		87		
c.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman																			
1)	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	unit	406	145	1.400.000	1173	14.200.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	2.318	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM	
2)	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	ha	294,58	0,000784	500.000	0,36	1.100.000	0,7	2.500.000	0,1	2.000.000	0,1	2.000.000	0,1	2.000.000	0,1	2.000.000	295,9		
3)	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	%	92,58	93,82	21.000.000	95,05	22.000.000	96,29	31.000.000	97,53	31.000.000	98,76	31.000.000	100,00	36.000.000	100	36.000.000	100	PELAKSANA URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,78	0,00		0,39		0,19		0,00		0,00		0,00		0,00		100		
4)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	%	69,68	77,26	18.500.000	84,84	27.500.000	92,42	33.000.000	100	35.080.000	100	19.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100		
	Prosentase layanan Air Limbah	%	60,52	70,39		80,26		90,13		100		100		100		100		100		
	Prosentase layanan Drainase	%	blm prny data																	
5)	Penataan dan pengelolaan tata bangunan	unit	7	8	30.100.000	13	93.100.000	11	43.100.000	19	100.100.000	5	33.100.000	5	15.100.000	61	15.100.000	61		
	Jumlah Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	unit	871	891		497		800		800		800		800		800		4588		
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah																			
1.	Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indek	36,46	41,35		46,24		51,13		56,03		58,47		60,92		60,92			
a.	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90		78,94		78,98		79,20		79,60		80,00		80,00		80,00	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1)	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	250.000	78,94	550.000	78,98	605.307	79,20	606.993	79,60	610.058	80,00	613.124	80,00	613.124	80,00	
b.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89		25,79		30,68		35,57		38,02		40,46		40,46		40,46	
		Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89		69,79		74,68		79,57		82,02		84,46		84,46		84,46	
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03		43,93		48,82		53,71		56,16		58,60		58,60		58,60	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
1) Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	48%	59%	175.000	70%	340.000	77%	520.000	81%	660.000	83%	770.000	50%	870.000	86%	PELAKSANA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	70%	71%		80%		82%		85%		88%		90%		90%		
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang dibitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten	%	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	5%	5%	160.000	9%	455.000	18%	502.160	27%	554.367	36%	606.621	45%	658.924	45%		
	Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	0	0		29.525		29.525		29.525		29.525		29.525		29.525		
3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	2,5%	2,5%	4.317.500	5,0%	15.380.756	7,5%	750.000	10,0%	600.000	12,5%	800.000	15,0%	800.000	15%		
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks		123		122		121		120		119		119		119		
a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang		sedang		sedang		sedang		sedang		sedang		sedang		
1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana (desa)	%		0	175.000	1	944.000	3	1.515.000	2	915.000	2	1.010.000	2	1.030.000	2	PELAKSANA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN KEBENCANAAN	
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang		0	225		225		225		225		225		225			225
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah		0	15		15		15		15		15		15			15
	Sekolah Sungai	Komunitas		0	0		0		2		3		3		2			2
2) Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	%	100	100	993.600	100	1.511.000	100	1.445.000	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100		
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	100	100	100.000	100	150.000	100	125.000	100	125.000		150.000	100	150.000	100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
VI. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian																		
1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	%	69,75	70		72		75		77		80		80			75,7	
a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	69,75	70		72		75		77		80		80			75,7	
1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	85	85	370.000	85	355.000	90	370.000	90	570.000	95	600.000	95	600.000		90	PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN
2) Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Persentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	5	0	190.500	0	240.000	4	645.000	5	845.000	6	650.000	6	650.000		21	
	Persentase ormas aktif yang terbina	%	70	75		80		80		85		85		90			82,5	
2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5%	5%		13%		23%		40%		70%		100%			100%	
a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%		33%		49%		66%		83%		100%			100%	
1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Prosentase kelompok pelestarian adat isliadat	%	7%	7%	125.024	7%	88.864	17%	160.000	33%	310.000	67%	355.000	100%	405.000		100%	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	13%	26%	775.309	39%	801.873	52%	856.000	65%	935.000	78%	941.000	91%	990.000		91%	
3) Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Prosentase KPMD yang di latih	%	0	17%	447.659	33%	59.572	50%	134.000	67%	155.000	83%	170.000	100%	170.000		100%	
3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90		93		95		97		99		100			100	
a. Tenujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90		93		95		97		99		100			100	
1) Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	31	267.000	31	1.454.900	31	1.868.200	31	2.150.036	31	2.188.036	31	2.204.236		100	PELAKSANA URUSAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100		100		100		100		100		100			100	
	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	40	50		64		70		75		75		80			80	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	91	91		91,25		91,5		91,75		92		92,25			92,25	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	90,91	91,00		91,25		91,50		91,75		92,00		92,25		92,25		
VII. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak																		
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	96,42	96,47		96,52		96,57		96,62		96,67		96,72		96,72		
a. Meningkatkan kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02		60,09		60,16		60,23		60,3		60,37		60,37		
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		
1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	persen	0	50	205.000	55	215.000	60	275.000	65	375.000	70	400.000	80	450.000	80		PELAKSANA BIDANG PANGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK
2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	rasio	5,21	5,21	215000	5,10	220.000	5,00	169.000	4,90	275.000	4,80	350.000	4,70	425.000	4,70		
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	2,18	1,54		1,5		1,45		1,40		1,35		1,30		1,30		
VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik																		
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	Indeks kepuasan layanan masyarakat																	
a. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338		78,762		79,016		80,047		81,078		81,078		81,078		
1) Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Trayek Utama	Trayek	4	4	604.000	4	655.000	4	1.347.401	4	1.375.000	4	1.420.000	4	1.420.000	4		PELAKSANA URUSAN PERHUBUNGAN
	Jumlah Trayek Cabang	Trayek	23	23		23		23		23		23		23		23		
	Jumlah Penumpang angkutan umum di terminal	jiwa / tahun	1.340.724	1.354.131		1.367.538		1.380.946		1.394.353		1.407.760		1.407.760		1.407.760		
	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	kendaraan	11.602	11.835		12.071		12.312		12.558		12.809		12.809		12.809		
	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,83	87,83		87,83		87,84		87,84		87,84		87,84		87,84		
	Jumlah Alat Uji	unit	8	8		8		10		12		12		12		12		
	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	1:00:00	1:00:00		0:50:00		0:45:00		0:40:00		0:35:00		0:35:00		0:35:00		
b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	%	84,50	84,07		79,52		79,52		80,00		80,00		80,00		80,00		0 PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL
1) Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan	hari	14	14	274.805	14	267.600		501.450		920.000		836.000		900.450			

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	sdh	sdh		sdh		sdh		sdh		sdh		sdh		sdh		
1) Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Prosen	0,85	0,88	1.035.000	0,9	2.743.359	0,9	2.965.172	0,9	3.261.689	0,91	3.587.858	0,91	3.946.644			PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan penerbitan KTP	Prosen	85,33	88,47		89,64		89,98		90,3		90,58		90,94				
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Prosen	86,24	89,73		89,18		89,53		92,81		92,18		92,52				
	Keluarga mempunyai KK	prosen		94		94,62		95,5		96,7		98		98,5			98,5	
	Penduduk berakte kelahiran	prosen		85,2		87,5		90		93,7		95,8		98			98	
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	akte nikah		226.797		238.546		250.500		263.150		265.850		277.800			277.800	
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian		356		1.031		1.731		2.400		2.950		3.500			3.500	
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi	%	75,00	75,20		75,40		75,60		75,80		76,00		76,20			76,20	
a. Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13		40,00		40,50		41,00		41,50		42,00			42,00	
1) Pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	30,43	31,00	378.770	32,00	791.647	33,00	870.812	34,00	957.893	35,00	1.053.682	36,00	1.159.050		36,00	PELAKSANA URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2) Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	0	0		41,33		42,00		42,50		43,00		43,50			43,50	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Di dalam bab ini disampaikan proyeksi indikasi pembelanjaan terhadap pengeluaran pembangunan baik pada belanja tidak langsung ataupun belanja langsung. Di samping itu disajikan rencana program pembangunan daerah berdasarkan pada basis urusan yaitu urusan baik wajib pelayanan dasar ataupun yang tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang. Pada setiap rencana program disampaikan target dan indikasi kebutuhan pendanaan untuk bisa melaksanakan dan mencapai target program sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Program merupakan instrumen pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang berisi satu atau lebih target program sesuai indikator yang telah ditetapkan. Di dalam bab ini dirangkum semua program pembangunan daerah baik program yang nantinya ditetapkan menjadi program prioritas dan program perangkat daerah guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang didalam rencana strategis perangkat daerah. Sedangkan program prioritas adalah program yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun masyarakat, karena keterdesakannya untuk dilaksanakan, untuk mengatasi pemecahan masalah yang krusial, serta sangat dinanti dan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa mengesampingkan program-program yang lainnya. Agar program tersebut betul-betul memenuhi kriteria prioritas dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan kebutuhan/kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan bersifat indikatif, disesuaikan dengan keinginan pencapaian Misi pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Proyeksi kapasitas pendanaan untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah tertuang didalam tabel 7.1. Sedangkan rencana program prioritas dengan indikator capaian dengan target dan pagu indikatifnya yang dikelompokkan di dalam masing-masing urusan diuraikan didalam tabel 7.2.

**Tabel 7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2018 - 2021
KABUPATEN KLATEN**

Kode	KAPASITAS RIIL / BELANJA	Proyeksi Rp. (000)			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Target	Target	Target	Target
1		8	10	11	13
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	666.160.467,13	862.354.226,28	874.031.062,26	895.744.644,68
	BELANJA	2.656.503.142,50	2.671.328.881,00	2.727.867.541,82	2.736.921.336,15
	Belanja Tidak Langsung	1.846.597.441,50	1.843.848.226,29	1.882.430.556,90	1.873.138.368,65
	Belanja Pegawai	1.161.909.785,50	1.161.909.785,50	1.161.909.785,50	1.161.909.785,50
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Hibah	55.987.450,00	40.500.000,00	70.500.000,00	60.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	11.395.502,00	11.502.969,10	12.078.117,56	12.682.023,43
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	611.819.504,00	627.835.471,69	635.842.653,84	636.446.559,72
	Belanja Tidak Tersangka / Terduga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Langsung	809.905.701,00	827.480.654,71	845.436.984,92	863.782.967,49
	Belanja Pegawai	77.712.564,56	50.000.000,00	51.085.000,00	52.193.544,50
	Belanja Barang dan Jasa	414.653.337,67	250.000.000,00	255.425.000,00	260.967.722,50
	Belanja Modal	317.539.798,77	527.480.654,71	538.926.984,92	550.621.700,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

**Tabel 7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN KLATEN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN					10.867.023.965		9.483.876.882		723.674.496		865.984.608		874.418.299		1.131.608.006		
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1. Urusan Pendidikan																	
1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	48.430	48.025	3.163.038	43.027	1.255.213	43.328	1.062.800	43.631	1.169.080	43.937	1.285.988	44.244	1.414.587	44.244	PELAKSANA URUSAN PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,19	92,37		78,61		92,59		92,79		92,99		93,19		93,19	
2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	94,53	105,23		97,45	12.421.565	97,65	14.143.000	97,85	15.557.300	98,05	17.113.030	98,25	18.824.333	98,25	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	87,58	97,57		90,93		91,13		91,33		91,53		91,73		91,73	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	81,60	91,26		86,84		87,04		87,24		87,44		87,64		87,64	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,94	72,77		68,22		68,42		68,62		68,82		69,02		69,02	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,64	92,43		88,28		88,48		88,68		88,88		89,08		89,08	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,03		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01		0,01	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,10	0,08		0,23		0,18		0,13		0,08		0,03		0,03	
	Angka Kelulusan SD/MI	%	97,78	99,34		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07	
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	95,55	97,73		98,11		98,13		98,15		98,17		98,19		98,19	
3) Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,78	99,57	823.380	99,62	838.192	99,72	245.000	99,73	269.500	99,74	296.450	99,75	326.095	99,75	
4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	86,42	87,83	1.423.777	76,97	271.023	79,97	800.000	82,97	880.000	86	968.000	89	1.064.800	89	
	Presentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,08	98,76		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07	
	Presentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	96,58	96,78		93,55		93,75		93,95		94,15		94,35		94,35	
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15	
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 11	1 : 12		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15	
5) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,78	99,57	259.470	99,62	198.856	99,72	220.000	99,73	242.000	99,74	266.200	99,75	292.820	99,75	
6) Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,64	92,43	823.850	88,28	642.584	88,78	1.215.000	89,28	1.336.500	89,78	1.470.150	90,28	1.617.165	90,28	
7) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Penyediaan pendanaan biaya operasi sekolah	siswa	144.998	143.598	5.000.000	144.998	5.799.920	143.929	275.000	145.256	4.707.680	146.656	7.782.800	148.056	9.413.360	148.056	
2. Urusan Kesehatan																	
1) Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	%	91,72	92,84	1.671.826	92,85	3.307.362	97	9.022.526	98	9.022.526	99	9.473.652	100	9.947.335	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	%	96,3	96,98		97,2		98		99		100		100		100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	95,72	97,59		97,57		98		99		100		100		100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	90,79	94		95,25		96		97		98		99		99	
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,96	96,04		99,67		99,2		99,4		99,6		100		100	
	Cakupan BBLR	%	5,22	5,25		5,14		5,10		5,06		5,02		5,00		5,00	
	Cakupan Anemia Wanita Usia Subur	%	-	-		-		35		33		30		28		28	
2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	-	20	358.017	30	381.063	50	669.150	70	670.525	90	670.525	100	704.051	100	
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	-	10		30		70		90		100		100		100	
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	70,44	81,88		99,65		100		100		100		100		100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	56,7	60		70		80		90		100		100		100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Diabetes mellitus	%	76	30		40		50		70		90		100		100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Gangguan liwa berat	%	-	70		80		90		100		100		100		100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	12	27,48		64,81		75		80		90		100		100		100
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emergen) < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	80	100		100		90		100		100		100		100		100
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	90	98,7		95,08		92,5		93		95		95		95		95
	Cakupan Bias C/DI/TD	%	98	98,8		98,72		98		98		98		98		98		98
3) Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	95,83	96	4.353.461	97	8.205.110	98	4.913.243	99	4.815.000	100	5.030.000	100	5.281.500	100		100
4) Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	50	50	51.775	50	48.325	55	55.000	58	130.000	100	130.000	100	136.500	100		100
	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		110
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	77.532	100	133.767	100	492.915	100	492.915	100	517.560	100	543.438	100		100
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	1	4		4		5		7		9		11		11		11
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	74	75,2		75,4		75,5		75,7		80		80,2		80,2		80,2
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	8	6		8		14		20		24		28		28		28
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	42	42		44		47		49		51		53		53		53
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	80	80		100		100		100		100		100		100		100
6) Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	61.095	100	58.371	100	608.822	100	608.822	100	639.263	100	671.226	100		100
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	73,59	81,6		72		79		80		81		82		82		82
	Cakupan Balita Stunting	%	26,1	27,6		27,2		27,3		27		26,8		26,6		26,6		26,6
	Cakupan Balita Wasting	%	8,4	10,9		10,5		10,8		10,5		10,2		10		10		10
	Cakupan Balita Underweight	%	16,1	19,1		18		18,3		18,1		18		18		18		18
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	1,69	1,38		1,13		2,8		2,5		2,3		2,0		2,0		2,0
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	-	81,4		81,6		85		85		85		85		85		85
7) Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa open defecation free (ODF)	%	14	19,95	1.172.458	32,92	325.994	100	1.125.123	100	1.125.123	100	1.181.379	100	1.240.448	100		100
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	-	-		26,342		25		30		40		50		50		50
	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	471.420	100	0	100	700.000	100	800.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100		100
8) Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	-	20,59	3.836.582	47,06	84.632	32,35	50.000	20,59	100.000	47,06	100.000	32,35	105.000			
9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase peserta sarasehan dan senam lansia	%	-	94,86	76.102	96,21	50.248	97	90.745	98,00	116.000	98	124.000	98	137.000	98		
10) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	5	9.026.398	5	8.689.530	5	10.161.222	5	10.161.222	5	10.669.283	5	11.202.747	5		5
11) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,28	0,29	14.874.604	0,29	13.704.247	0,29	15.971.264	0,29	37.441.856	0,29	24.250.000	0,29	25.462.500			
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,23	0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22				
12) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	Rasio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,34	1,34	33.712.837	1,38	23.432.581	1,38	4.975.000	1,38	6.540.000	1,38	8.500.000	1,38	8.500.000	1,38		1,38
13) Peningkatan Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	14,7	52,55	15.767.379	42,04	26.014.678	62	28.000.000	65	29.000.000	70	30.000.000	70	31.000.000	70		70
14) Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan	Persentase pengelolaan SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)	%	50,00	80,00	81.613	-	-	-	-	100	3.500.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100%		100%
15) Peningkatan Derajat Kesehatan	NDR (Net Dealt Rate) angka kematian . 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	9,5	25,00	2.775.000	13,74	6.248.475	< 25	-	< 25	7.000.000	< 25	8.000.000	< 25	9.000.000			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	56,8	28,00		37,21		< 45		< 45		< 45	0	< 45	0	< 45		
16) Pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru paru/Rumah Sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	442.826	100	47.651	-	-	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.400.000	100		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1) Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	60,90	61,30	47.453.719,98	61,75	148.861.218,36	62,25	196.851.000,00	81,32	242.450.000,00	81,90	259.100.077,44	82,47	271.222.357,27	82,47	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	49,51	55,26		56,92		58,68		61,49		64,41		67,40		67,40		
2) Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong	Prosentase panjang talud jalan yang dibangun	%	-	-	-	15,69	1.162.668,25	41,18	1.200.000,00	60,78	1.000.000,00	80,39	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00		
3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara	%	12,02	25,85	13.061.775,76	43,09	17.910.016,47	54,31	7.000.000,00	66,33	10.000.000,00	83,17	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00		
4) Penataan Trotoar Jalan	Prosentase rasio trotoar yang tertata	%	54,00	54,50	452.540,00	55,50	4.341.884,00	56,00	3.000.000,00	57,58	2.000.000,00	59,16	2.000.000,00	60,74	2.000.000,00	60,74		
5) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinarmargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia	%	60,38	60,38	-	92,45	6.523.079,60	92,45	-	100,00	550.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00		
6) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	20,00	22,20	17.689.684	24,26	14.260.898	26,00	20.833.000	28,00	11.500.000	30,00	12.000.000	32,00	12.000.000	32,00		
7) Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	%	69,67	71,96	893.359	74,26	4.418.037	76,56	5.350.000	78,86	1.000.000	81,16	1.000.000	83,46	1.000.000	83,46		
8) Pembinaan dan Pengembangan bidang kelenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	unit	795	145	2.580.611	1028	32.085.736	250	4.894.262	250	4.894.262	250	4.894.262	250	4.894.262	2.968		
9) Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	12,5%	12,5%	292.246,5	25%	399.334,5	43,75%	1.200.000	62,5%	1.575.000	81,25%	1.525.000	100%	2.475.000	100%		
10) Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	35%	575.000	60%	550.000	85%	550.000	85%		
11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	30%	30%	422.588,1	42%	312.372,95	54%	325.000	66%	350.000	78%	400.000	90%	400.000	90%		
	persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	%	19,42	19,42		30,25		47,69		65,13		82,56		100,00		100,00		
12) Program Pembangunan Drainase / gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase	%	65	66	48.444,9	66,95	3.295.000,00	71	1.850.000	71,2	2.000.000	71,5	2.250.000	72	2.500.000	72		
13) Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	%	69,68	77,26	7.192.303	84,84	312.785	88,5	33.000.000	91,37	33.000.000	94,25	33.000.000	97,13	33.000.000	97,13		
	Prosentase layanan Air Limbah	%	60,52	70,39		80,26		92,5		94,37		96,25		98,12		98,12		
14) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun	%	13,11	13,11	-	34,43	29.586.609,79	52,46	69.400.000	83,61	70.000.000	91,80	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00		
15) Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,78	0,73	-	0,39	2.675.859,25	0,19	52.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	100		
4. Urusan Sosial																		
1) Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	94	-	-	-	-	97	100.000	98	130.000	99	132.808	100	135.000	100	PELAKSANA URUSAN SOSIAL	
2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,1	5,3	407.870	24	421.076	26	1.190.100	28	974.500	30	995.549	32	1.007.298	32		
	Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah	%	-	88,94	18.071	90,28	18.344	91	21.419	100	21.419	100	21.419	100	21.419	100		
3) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	18	-	-	-	-	-	-	26	82.500	28	84.282	30	90.000	30		
4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	394.532	100	559.505	100	486.244	100	872.000	100	935.000	100	985.000	100		
	Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi	%	-	36,39	9.546	35,67	3.567	70	9.949	90	23.457	100	23.457	100	23.457	100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5) Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	%	40,78	33,11	115.991	35,52	65.336	43,78	50.250	44,78	82.500	-	-	-	-	-	-	-
6) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	%	-	-	-	77,58	45.384	88	50.503	80	100.000	80	105.000	80	115.000	80	80	
7) Peningkatan Keagamaan	Persentase Kehadiran Masyarakat	%	-	64,29	2.708.015	74,34	3.027.166	85	3.371.316	90	3.379.751	90	3.394.756	90	3.394.756	90	90	
8) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	0	0	175.000	1	944.000	3	1.515.000	2	915.000	2	1.010.000	2	1.030.000	2	10	
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	0	225		225		225		225		225		225		225	225	
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	0	15		15		15		15		15		15		15	15	
	Sekolah Sungai	Komunitas	0	0		0		2		3		3		3		3	3	
9) Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	993.600	100	1.511.000	100	1.445.000	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100	100	
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		100	100	
	Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		100	100	
10) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100.000	100	150.000	100	125.000	100	125.000		150.000	100	150.000	100	100	
11) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kawasan Bencana	%	100	100	0	100	0	100	0	100	234.824,98	100	239.897,20	100	245.078,98	100	100	
5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1) Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	%	92,58	93,82	-	95,05	-	96,29	31.000.000	97,53	31.000.000	98,76	31.000.000	100,00	36.000.000	100	100	
2) Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	unit/blok	0	0	-	0		0		5	500.000	10	1.200.000	10	1.300.000	25	25	
6. Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	90	90	408.272	92	691.145	94	685.000	96	1.094.350	98	944.750	100	1.050.000	100	100	
	Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	672.581	100	744.679	100	1.180.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.220.000	100	100	
2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	persentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	%	15	15	276.302	15	9.936	20	10.000	49	20.000	49	20.000	100	25.000	100	100	
	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	2	2	49.662	4	148.490	4	140.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	22	22	
	Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	226.642	100	217.220	100	232.000	100	250.000	100	250.000	100	300.000	100	100	
3) Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Anggola korsik yang terlatih	%	100	100	137.095	100	145.054	100	150.000	100	150.000	100	200.000	100	220.000	100	100	
	Prosentase pendataan dan pemetaan masalah ketahanan seni budaya, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan	%	-	100	49.499	100	49.599	100	50.000	-	-	-	-	100	60.000	100	100	
4) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	91	3.650	672.909	92	916.440	94	1.452.161	96	2.601.775	98	2.601.775	100	3.000.000	100	100	
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	31		31												
5) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	90,91	91,00	53.511	91,25	285.618	91,50	425.000	91,75	475.000	92,00	505.000	92,25	650.000	92,25	92,25	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan)	%	91	91	-	91,25	-											
	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	90,91	91,00	-	91,25	-											
6) Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggola pemadam kebakaran yang terlatih	%	0	0	0	0	0	15	65.000	13	100.000	12	100.000	40	265.000	40	40	
7) Penanganan Darurat Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	993.600	100	1.511.000	94	1.138.200	96	1.209.037	98	1.209.037	100	6.060.873	100	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	50	0	64	0										
	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	40	50	0	64	0										
8)	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	%	-	-	0	100	89.850	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100			
9)	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	10	10	339.156	10	326.660	10	370.000	10	570.000	10	400.000	10	420.000	60	
10)	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	%	5	-	97.182	-	145.286	4	801.000	5	925.000	6	830.000	6	330.000	21	
	Prosentase ormas aktif yang terbina	%	70	75		80		80		85		85		90		82,5	
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
1.	Usuran Tenaga Kerja																
1)	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	1754,45	1997,14	130.148	1770	359.469		830.000		1.309.000		1.400.000		1.500.000		PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76		66,93											
	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	-		2											
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-		-		56		58		60		62		62	
2)	Peningkatan Kesempatan Kerja	%	97,25	97,25	180.430	0	173.560	-	275.000	-	275.000	-	295.000	-	350.000	-	
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	-		22,19		25,20		25,30		25,40		25,50		25,50	
3)	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	%	9,24	8,69	175.827	-	103.602	-	169.000	-	201.000	-	213.000	-	300.000	-	
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	-	-		78,95		79,50		80,00		80,50		81,00		81,00	
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	%	-	-		6,38		6,20		6,70		6,00		5,90		5,90	
2.	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1)	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	-	0	41.010	0	48.130	60	60.000	65	275.000	70	400.000	80	450.000	80	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2)	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	rasio	5,21	3,69	4.000	3,29	83.254	5,00	44.000	4,90	110.000	4,80	350.000	4,70	425.000	4,70	
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	2,18	1,54		0,25		1,45		1,40		1,35		1,30		1,30	
3)	Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan	%	3,49	3,49	114.231	17,20	164.070	94,01	125.000	100	295.000	100	360.000	100	375.000	100	
4)	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	dokumen	2	2	219.036	3	98.858	9	149.000	10	295.000	-	-	-	-	-	
3.	Usuran Pangan																
1)	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	(Skor PPH)	91,71	92	1.140.880	92,25	876.797	92,5	1.435.000	92,75	1.590.000	93	1.610.000	93,25	1.335.000	93,25	PELAKSANA URUSAN PANGAN
2)	Peningkatan ketahanan pangan	Ton	59.750	57.530	95.107.500	54.350	83.980.400	63.450	495.000	88.035	80.000	88.035	90.000	88.035	100.000	88.035	
	Penerimaan pendapatan DBHCHT	Rupiah	15.168.602.000	14.282.125.000	-	15.666.717.000	-	14.944.437.000	-	15.039.148.000	100.000	14.964.426.000	120.000	15.126.767.000	130.000	15.126.767.000	
4.	Usuran Lingkungan Hidup																
1)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	48%	59%	1.819.571,82	70%	630.243	77%	520.000	81%	660.000	83%	770.000	50%	870.000	86%	PELAKSANA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	70%	71%		80%		82%		85%		88%		90%		90%	
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2)	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	5%	5%	148.790.50	9%	296.800,07	18%	502.160	27%	554.367	36%	606.621	45%	658.924	45%	
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	5%	5%	148.790.50	9%	296.800,07	18%	502.160	27%	554.367	36%	606.621	45%	658.924	45%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Prosentase lurus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	0	0		20		40		60		80		100		100		
3)	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	%	80%	100%	-	100%	-	100%	700.000	100%	700.000	100%	750.000	100%	750.000	100%		
4)	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	%	40%	100%	-	100%	-	100%	600.000	100%	600.000	100%	600.000	100%	600.000	100%		
5)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	%	13,93	12,89	15.448.572	14,49	35.619.551	15,20	20.352.825	16,63	22.050.212	17,21	22.989.166	17,92	23.912.860	17,92		
	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	2,5%	2,5%		5,0%		7,5%		10,0%		12,5%		15,0%		15%		
6)	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	ha	294,58	0,000784	3.751.856	0,36	2.681.121	0,7	5.734.620	0,15	1.228.874	0,125	1.024.039	0,125	1.024.039	296,0		
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
1)	Penataan administrasi kependudukan	%	0,85	0,88	891.741	0,9	2.448.503	0,9	2.965.172	0,9	3.261.689	0,91	3.587.858	0,91	3.946.644			
	Cakupan penerbitan KTP	%	85,33	88,47		89,64		89,98		90,3		90,58		90,94				
	Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	%	86,24	89,73		89,18		89,53		92,81		92,18		92,52				
	Keluarga mempunyai KK	%		94		94,62		95,5		96,7		98		98,5		98,5		98,5
	Penduduk berakte kelahiran	%		85,2		87,5		90		93,7		95,8		98		98		98
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	%		226.797		238.546		250.500		263.150		265.850		277.800		277.800		277.800
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian		356		1.031		1.731		2.400		2.950		3.500		3.500		3.500
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																		
1)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	%	13	13	1.292.000	35	951.880	47	100.000	77	6.665.000	89	3.505.000	100	4.480.000	100		PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	15	15	111.941	31	567.740	46	900.000	72	1.500.000	87	1.680.000	100	1.795.000	100		PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3)	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	%	7	7	1.162.392	29	528.142	46	825.000	64	591.000	82	704.000	100	875.000	100		
4)	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	%	14	29	33.739	43	200.583	51	382.000	58	300.000	64	370.000	70	450.000	70		
5)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	7	7	235.749	7	203.831	17	569.000	33	310.000	67	355.000	100	405.000	100		
6)	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	%	13	26	775.309	39	801.873	52	856.000	65	935.000	78	941.000	91	990.000	91		
7)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	%	0	0	-	0	-	0	-	100	1.000.000	0	-	0	-	100		
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1)	Keluarga berencana	%	75,9	78,7	1.277.552	64,93	1.274.107	64,97	8.029.840	65	9.188.840	65,03	8.625.000	65,06	8.710.000	65,06		PELAKSANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	5,5	6		3,9		5,3		5,1		4,98		4,95		4,95		4,95
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	14,3	10,13		9,3		9		8,97		8,94		8,91		8,91		8,91
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%																
2)	Kesehatan Reproduksi Remaja	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	41	40	10.001	39	7.593	37	14.500	35	31.500	33	145.000	31	155.000	31		
3)	Peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	625.000	26	635.000	26		
4)	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri	%	86,31	-	246.281	-	245.785	90	285.000	91	313.000	-	-	-	-	-		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada		
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5) Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	%	66	70	15.000	75	11.911	-	-	75	50.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	%	55	65		75				75									
	Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	%	70	75		80				80									
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	45	50		60				65									
	6) Pelayanan Kontrasepsi	DO KB	%	18,95	18	139.653	14	92.708	16	92.000	15	188.000	-	-	-	-	-	-	-
		Unmet Need	%	10	17		13		9,5		9								
	7) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Peserta Kb Mandiri	%	86,31	-	133.039	-	348.376	89	246.500	90	306.600	-	-	-	-	-	-	-
	8) Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I	%	38,8	33,58	37.565	34,08	32.813	32	17.500	30	31.500	-	-	-	-	-	-	-
	9) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	BKB	621	621	25.206	622	41.999	636	14.000	641	135.000	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	BKR	271	266		266		281		286								
Jumlah tenaga pendamping kelompok Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL)		BKL	469	464		464		479		484									
Jumlah tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		UPPKS	581	576		558		591		596									
10) Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		Persentase anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang aktif mengikuti kegiatan	%	17	17	19.500	16	24.429	20	54.000	21	175.000	-	-	-	-	-	-	-
8. Urusan Perhubungan																			
1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersusun	%	0	0	-	0	-	50	150.000	50	-	75	225.000	75	-	75	-	75	
2) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	22,67	27,85	2.141.573,62	31,53	3.416.764,12	33,88	6.765.214	36,96	12.570.000	40,03	6.535.000	43,00	7.250.000	43,00			
3) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	72	76	432.607,16	82	1.454.807,27	85	266.856	86	1.940.000	87	2.490.000	87,24	3.150.000	87,24			
4) Peningkatan pelayanan angkutan	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	indeks	60	63,04	307.245,80	67,25	271.649,80	69,42	447.400	72,17	515.000	74,82	530.000	77,33	550.000	77,33			
5) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,83	87,83	279.626,40	87,83	368.054,90	87,84	1.287.901	87,85	2.692.000	87,86	1.414.000	87,87	2.100.000	87,87			
6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Terpasang	%	77,78	77,78		77,78		77,78		77,78		83,33	9.775.000,00	88,89	2.000.000,00				
9. Urusan Komunikasi dan Informatika																			
1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	%	32,2	32,2	413.500	52,2	273.100	52,2	860.000	53,6	320.000	55,08	365.000	56,5	410.000	56,5			
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	15	30		46		61,5		73		84,6		100		100		100	
	Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government	%	0	10		14		40		60		80		100		100		100	
2) Pengembangan Data/Informasi	Persentase dokumen profil daerah yang tersedia	%	17	17	46.900	33	61.921	50	70.000	67	70.000	83	75.000	100	75.000	100			
3) Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase event kabupaten terpublikasi	%	0	0	0	0	-	85	250.000	90	675.000	92	742.500	95	812.750	95			
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor						0		60		65		70		70			
	Persentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa	%	80	85	482.172	95	590.034	100	768.500	100	800.000	100	850.000	100	900.000	100			
	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	%	90	95	199.657	73	186.372	100	275.000	100	300.000	100	325.000	100	350.000	100			
	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial	%%	-	-	-	-	-	-	-	100	25.000	100	50.000	100	60.000	100			
	Persentase publikasi Kepala Daerah melalui penulisan dan media papan ruang	%	90	90	142.277	74	130.727	100	137.142	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100			
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio	%	96	100	55.000	34	341.000	90	137.000	90	150.000	90	200.000	90	250.000	90			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	%	-	70	600.000	93	419.000	95	300.000	95	300.000	95	350.000	95	350.000	95	
4)	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	%								33,33	631.000	66,67	694.500	100	764.000	100	
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
1)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	%	0,04550	0,09101	187.207	0,18177	494.603	0,27240	500.000	0,36320	1.140.000	0,40842	700.000	0,49872	750.000	0,49872	PELAKSANA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2)	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	%	10	10	273.648	30	579.261	40	626.000	50	650.000	60	650.000	70	650.000	70	
3)	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	72,20	70,58	74.905	80,07	317.609	80,20	250.000	80,18	580.000	80,59	455.000	80,97	400.000	80,97	
	Persentase pertumbuhan koperasi	%	0,012	0,027		(0,059)		0,012		0,028		0,037		0,045		0,045	
	Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	%	4,39	4,12		5,89		9,76		11,68		13,53		16		16	
11. Urusan Penanaman Modal																	
1)	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				7.383		38.064.044		140.000		756.000		775.000		780.000		PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL
	PMDN (dim. ribu Rp)	Rp	89.208.500	89.208.500		90.823.174		92.621.473		94.659.145		97.025.624		99.451.264		563.789.180	
	PMA (dim. ribu US\$)	US\$	11.278.80	11.278.80		11.549.491		11.832.454		12.128.265		12.437.536		12.754.683		71.981.239	
	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)																
	PMDN investor	investor	12	12		13		14		15		16		17		87	
	PMA investor	investor	5	5		5		5		5		5		5		30	
	Peningkatan Pendapatan BUMD	Rupiah	3,24 M	4,09 M	113.857.500	4,59 M	316.000	4,89 M	313.000	5 M	486.000	5,1 M	522.000	5,2 M	56.050.000	5,2 Milyar	
2)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				254.491		549.950		549.950		715.000		706.000		715.000		
	Rasio daya serap tenaga kerja																
	PMDN	org	189	238		397		417		438		460		483		2.433	
	PMA	org	46	294		294		294		294		294		294		1.764	
	Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi																
	PMDN	%	1,75	1,75		1,81		1,98		2,20		2,50		2,50		12,74	
	PMA	%															
	Lama Proses Perizinan	hari	14	14		14											
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84,50	84,0		80,0		80,0		80,0		80,0		82,0		82,0	
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga																	
1)	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	%	60	64	24.982	66	348.124	66	350.000	69	810.000	69	835.000	72	900.000	72	PELAKSANA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	%	2	2	148.500	15	159.040	-	-	25	250.000	20	100.000	25	200.000	25	
3)	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	%	15	-	-	15	98.670	20	200.000	20	250.000	25	275.000	25	300.000	25	
4)	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	-	-	-	-	10	50.503	10	150.000	10	165.000	10	165.000	40	
5)	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	77	80	287.218	80	592.951	80	1.250.000	80	1.140.000	83	1.300.000	83	1.300.000	83	
6)	Pembinaan pemuda dan olahraga	%	10	10	845.021	15	734.652	15	750.000	20	1.300.000	20	1.450.000	20	1.450.000	100	
	Persentase Kehadiran Peserta	%	-	87,14	53.879	93,33	87.568	90	49.798	90	102.500	90	127.500	90	155.500.000	90	
13. Urusan Statistik																	
1)	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	%	7,14	7,14	45.000	14,29	72076	42,86	155000	71,43	190000	100	200000	100	200000	100	PELAKSANA URUSAN STATISTIK
14. Urusan Persandian																	
1)	Peningkatan persandian daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	23,5	50.000	25	55.000	27	60.000	27	PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN
15. Urusan Kebudayaan																	
1)	Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	5	6	2.395.161	6	3.203.869	6	2.121.000	6	2.660.000	6	2.850.000	6	2.850.000	6	PELAKSANA URUSAN KEBUDAYAAN
2)	Pengembangan Nilai Budaya	%	7	8	47.956	9	160.884	10	110.000	11	110.000	12	110.000	13	110.000	13	
	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%															

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3) Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	5	0	5	99.901	5	125.000	5	125.000	5	135.000	5	135.000	30		
4) Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase Fasilitas Pementasan Budaya Daerah	%	-	-	0	95	390.870	100	300.200	100	300.000	100	330.000	100	360.000	100		
16. Urusan Perpustakaan																		
1) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	%	-	10	241.545	10	470.662	10	640.847	10	690.000	10	740.000	10	760.000	60	PELAKSANA URUSAN PERPUSTAKAAN	
17. Urusan Arsip																		
1) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	68.700	5	168.448	5	229.434	5	190.000	5	352.500	5	400.000	5	450.000	30	PELAKSANA URUSAN ARSIP	
2) Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	10	10	9.593	10	18.895	10	20.000	10	150.000	10	150.000	10	200.000	60		
3) Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	%	0	0	0	10	75.000	0	0	20	547.500	10	220.000	10	200.000	50		
C. URUSAN PILIHAN																		
1. Urusan Kelautan dan Perikanan																		
1) Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	(ton)	27.831	28.660	2.956.895.042	29.515	1.616.560	30.396	1.771.000	31.302	1.775.000	31.467	1.775.000	31.467	2.483.000	31.467	PELAKSANA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2) Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap	(ton)	468	469	19.818.800	506	224.035	516	50.000	526	55.000	537	60.000	537	75.000	537		
3) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)	13,0	15.14	0	17,2	245.461	18.72	150.000	19.91	150.000	20.41	200.000	20.41	200.000	20.41		
2. Urusan Pariwisata																		
1) Pengembangan Kemitraan	Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bemitra	%	5	5	193.768	6	288.114	10	500.000	10	630.000	12	720.000	15	720.000	35	PELAKSANA URUSAN PARIWISATA	
2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan Rata-rata lama kunjungan wisatawan	% hari	5 0,5	791,8 1	375.760	-17,7 1	986.801	5 1	635.000	8 1	1.010.000	10 1	1.095.000	10 1	1.095.000	33 1		
3) Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	17	17	373.308	17	570.654	17	3.934.800	22	5.220.000	28	5.350.000	33	5.350.000	33		
3. Urusan Pertanian																		
1) Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	%	4	4	734.377	5	876.106	5	2.190.000	6	3.830.000	6	3.830.000	6	3.756.000	64,01	PELAKSANA URUSAN PERTANIAN	
2) Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung Produktivitas Kedelai	(kw/ha)	63,97	63,98	7.661.516	63,99	6.407.975	63,99	5.199.000	64	6.100.000	64,01	6.550.000	64,01	6.550.000	64,01		
3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Mengikuti agro ekspo	(kali)	2	2	25.000	2	24.775	2	60.000	2	60.000	2	65.000	2	75.000	2		
4) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	fasilitasi operasional Penyuluh	(orang)	209	209	608.395	209	107.023	209	228.000	209	228.000	209	245.000	209	278.000	209		
5) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang Produksi Tembakau Asepan	(ton)	815 1.164	815 1.038	3.586.459	1.037 808	1.511.858	1.087 952	4.800.000	1.091 1.167	4.495.000	1.092 946	4.495.000	1.092 946	4.356.000	1.092 946		
6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Populasi Sapi	(ekor)	99.438	93.788	48.060	97.954	70.831	104.450	245.000	108.628	245.000	112.973	255.000	117.492	255.000	117.492		
7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi	(ton)	2.140	2.289	228.974	2.450	127.055	2.621	1.350.000	2.805	1.350.000	3.001	1.445.000	3.211	1.445.000	3.211		
8) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	(pengusaha)	180	185	44.970	200	299.329	200	530.000	225	855.000	235	855.000	250	900.000	250		
9) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Memanfaatkan potensi sumber daya hutan				95.334													
10) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Merehabilitasi hutan dan lahan				2.961.219													
4. Urusan Perdagangan																		
1) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal Persentase cakupan pelayanan UTPP Inflasi tahunan Persentase konsumen yang terlindungi	% % % %	0,318 0 3 -	0,364 0 2 -	168.613 0 168.613.400 0	0,407 0 3 100	180.148 97.312 205.117 89.850	0,458 16,6 3,5 % (±1) 100	165.000 395.000 200.000 100.000	0,521 35 3,5 % (±1) 100	600.000 2.500.000 250.000 100.000	0,584 50 3,5 % (±1) 100	535.000 900.000 275.000 100.000	0,647 75 3,5 % (±1) 100	535.000 900.000 280.000 100.000	0,647 75 3,5 % (±1) 100	0,647 75 3,5 % (±1) 53,06	PELAKSANA URUSAN PERDAGANGAN
2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	30,61	2,041	2.237.988	8,163	14.290.662	4,082	15.805.000	4,082	28.490.000	4,082	8.810.000	4,08	14.370.000	53,06		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	66,67	72,22	48.747	77,78	221.283	61,95	300.000	65,65	350.000	69,56	350.000	73,16	350.000	73,16		
5. Urusan Perindustrian																		
1) Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri menengah dan besar Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI Debitur penerima KUR	unit usaha dokumen % Orang		132,00 57,00 0,00 6650	99.320 60,00 0,00 99320100	135,00 60,00 0,00 28034	641.600 60,00 0,00 474368		759.560 6,20 350000 30700,00		1.745.000 6,60 450000 30900,00		1.800.000 7,00 500000 31000,00		2.000.000 7,40 510000 31000,00			PELAKSANA URUSAN PERINDUSTRIAN
2) Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	unit usaha pengrajin % %	63,00 - 0 0	68,00 180,00 0 0	39.087 183 0 0	71 183 0 0	18.430 183 0 0		100.000 3,60 3,80 11,00		570.000 3,80 3,80 11,50		585.000 4,00 4,00 12,00		625.000 4,30 4,30 12,50			
3) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Laju pengembangan sentra industri	%								0,05	250.000	0,10	250.000	0,15	250.000	0,15		
6. Urusan Transmigrasi																		
1) Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi swakarsa / umum Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	KK %	7 -	19 -	271.697 -	4 -	122.840 -	- 33,00	218.000 34,00	- 34,00	391.000 35,00	- 35,00	391.000 36,00	- 36,00	400.000 36,00	- 36,00		PELAKSANA URUSAN TRANSMIGRASI
2) Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	-	-	-	41,33	23.312	42,00	32.000	42,50	68.000	43,00	68.000	43,50	75.000	43,50		
D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
1. Urusan Perencanaan																		
1) Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERDA Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd Penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD	Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada % %	Ada Ada Ada 85 85	Ada Ada Ada 90 90	1.930.000 Ada Ada 95 95	Ada Ada Ada 95 95	1.809.150 Ada Ada 26,62 531.236.595	Ada Ada 26,62 531.236.595	2.045.917 Ada Ada 26,62 531.236.595	Ada Ada 26,62 531.236.595	2.120.000 Ada Ada 27,27 531.236.595	Ada Ada 27,27 531.236.595	2.200.000 Ada Ada 27,92 531.236.595	Ada Ada 28,57 531.236.595	2.300.000 Ada Ada 28,57 531.236.595	Ada Ada 28,57 531.236.595		PELAKSANA URUSAN PERENCANAAN
2) Perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah	% % %	55 Ada 22,73	55 Ada 25,97	560.000 Ada 25,97	60 Ada 25,97	470.000 Ada 25,97	65 Ada 26,62	525.000 Ada 26,62	70 Ada 27,27	525.000 Ada 27,27	75 Ada 27,92	550.000 Ada 28,57	80 Ada 28,57	650.000 Ada 28,57	80 Ada 28,57		
3) Perencanaan sosial dan budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	% %	79 100	83 100	405.720 100	85 100	455.629 100	87 100	490.000 100	90 100	540.000 100	92 100	600.000 100	100 100	565.000 100	100 100		
4) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	Ada/ Tidak Ada %	Ada Ada	Ada Ada	408.850 Ada	Ada Ada	675.000 Ada	Ada 100	330.000 100	Ada 100	400.000 100	Ada 100	450.000 100	Ada 100	500.000 100	Ada 100		
5) Peningkatan Kualitas Perencanaan					0		531.236.595											
2. Urusan Keuangan																		
1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	% bulan bulan	7,14 3 6	17,61 3 6	7.039.573.340 3 6	50,30 3 6	8.238.202.333 3 6	7,24 3 6	10.903.596 3 6	7,34 3 6	12.345.200 3 6	7,44 2 5	12.613.071 2 5	7,54 2 5	12.886.754 2 5	7,54 2 5		PELAKSANA URUSAN KEUANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	lepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	51,6	51,6		51,6		52,5		53,0		53,5		53,9		53,9		53,9
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	%	84,0	85,0		81,0		82,0		83,0		84,0		85,0		85,0		85,0
	Meningkatkan Pengelolaan aset daerah	%	0,72	0,74	0	0,74	81.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0	0	0	0	81.830	0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72
	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,5	1,71		1,12		1,54		1,56		1,58		1,75		1,75		1,75
3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		
1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	%	95	95,43	1.121.783	78,52	2.298.065	60	3.475.000	100	5.340.000	100	5.940.000	100	6.590.000	100		PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase layanan sumber daya aparatur	%	76,00	76,74	15.347	93,66	131.119	94	40.000	95	200.000	95	300.000	96	350.000	96		PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Prosentase Pembinaan Disiplin ASN	%	0	78	229.429	48	172.645	80	172.000	100	193.000	100	194.000	100	195.000	100		PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	%	0	98,73	152.063	94	132.162	80	190.000	100	400.000	100	445.000	100	480.000	100		PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Prosentase Pengembangan Aparatur	%	0	66,04	810.932	76	1.600.306	80	2.260.000	100	3.250.000	100	2.565.000	100	3.265.000	100		PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4. Urusan Penelitian dan Pengembangan																		
1) Penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	29	20	250.000	22	250.000	25	400.000	30	400.000	30	400.000	35	500.000	35		PELAKSANA URUSAN PENELITIAN DAN
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	7	10		14		16		18		19		22		22		PELAKSANA URUSAN PENELITIAN DAN
5. Urusan Pengawasan																		
1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level maturitas SPIP	indek 1-5	1	1,12	2.746.063,615	2,29	#####	2,90	4.669.789	3	6.847.000	3	7.011.000	3	#####	3		PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	peningkatan level kapabilitas APIP	indek 1-5	2 dc	2 dc	475.336,693	2	352.795,690	3 dc	450.000	3	477.000	3	483.000	3	490.000	3		PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
3) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase pemeriksaan program tahunan	%	42	48	Rp 2.001,600	50	2.150,500	99,0	5.000	100	33.000	100	36.300	100	39.900	100		PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
6. Fungsi Lainnya																		
1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	%	100	100	16.147.672	100	22.224.464	100	32.675.329	100	35.796.862	100	37.231.050	100	37.231.050	100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM mauoun RKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Persentase produk Perda terbentuk	%	100	100		100		100		100		100		100		100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Persentase produk pengawasan DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	%	100	100		100		100		100		100		100		100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
2) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKJP secara benar	%	50	50,11	614.729	90	440.523	90	795.523	90	854.075	92	926.983	95	1.029.681	95		SEKRETARIAT DAERAH
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)	%	60	80,84	137.432	81,71	404.485	83	685.000	85	700.000	87	715.000	90	725.000	90		SEKRETARIAT DAERAH
4) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaporan penyelenggaraan	%	100	100	320.639	100	511.735	100	700.000	100	420.000	100	440.000	100	500.000	100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	1.253.282	100	1.141.293	100	925.000	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100		SEKRETARIAT DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Pendampingan Keprotokolalan Kepala Daerah	%	-	-	-	-	-	100	176.160	100	230.000	100	250.000	100	275.000	100	
5) Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	%	10	10	44.829	15	97.369	15	150.000	15	155.000	15	160.000	15	170.000	85	
6) Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	Pilar	50	50	18.407	50	99.592	50	365.000	50	410.000	50	425.000	50	425.000	300	
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	obyek	50	50		50		50		50		50		50		300	
7) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	%	-	-	-	70	80.000	80	90.000	90	90.000	100	100.000	100	100.000	100	
8) Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	275.000	85	475.000	85	
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	71,36	-	-	-	-	-	-	-	-	81,5		82		82	
9) Penataan peraturan perundang undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	%	15	23	1.016.416	23	1.574.850	28	1.485.000	12	1.366.000	20	2.233.000	20	1.720.000	100	
	Persentase perda yang terselesaikan	%	15	23		23		28		12		20		20		100	
	Persentase perkara yang terselesaikan	%	50	68		65		65		50		50		50		100	
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	100	113		108		113		77		90		90		100	
10) Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	2	4	303.682	4	425.282	6	658.000	6	-	4	950.000	8	1.034.500	8	
11) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	90	90	897.000	60	1.300.000	65	1.300.000	66	1.690.000	68	1.820.000	69	1.300.000	69	KECAMATAN
	Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu	%	95	80		60		65		70		70		70		70	
	Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	90	90		90		90		90		90		90		90	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	%	0,5	0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		0,9		0,9	
12) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	60	60	1.170.000	50	1.170.000	70	1.326.000	70	1.430.000	70	1.430.000	70	1.560.000	70	
	Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	50	80		80		80		80		80		80		80	
	Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	%	70%	70%		70%		70%		80%		80%		80%		80%	
13) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	%	40	41	2.080.000	50	2.080.000	60	2.197.000	70	2.210.000	80	2.210.000	90	2.340.000	95	
14) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Persentase usulan kegiatan musrenbang kelurahan yang terealisasi didalam APBD	%	45	50	167.048	55	189.391	60	244.938	70	269.432	80	296.375	90	326.012	95	KELURAHAN
15) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	40	50	35.776	60	42.042	70	45.500	80	50.050	90	55.055	92	60.561	95	
16) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase kelembagaan pemerintahan kelurahan yang aktif	%	40	50	237.923	60	301.911	70	643.968	80	708.365	90	779.201	92	857.121	95	
17) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100,00	100	681.552,58	100	719.845	100	862.346	100	1.017.054	100	1.300.059	100	1.626.365	100	SEKRETARIAT DAERAH
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (cabaian)	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100	
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
18) Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi <u>pengadaan barang dan jasa</u>	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	100			100	211.963	100	355.416	100	620.000	100	650.000	100	710.000		100	
19) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Bahan pokok	9	9	1.253.282	9	1.141.293	9	92.500	-	-	-	-	-	-	-	-	6.319.575
	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bulan	12	-	-	-	-	-	-	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000			
20) Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	%				68	75549	70	110000	72	200000	74	220000	76	220000			76
E. PENUNJANG TUSI PERANGKAT DAERAH																		
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	%	85	87	52.451.232	90	34.162.969	94	42.115.386	98	46.326.925	100	50.959.617	100	56.055.579			SEMUA OPD
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	80	86	26.215.968	88	25.829.487	90	14.847.961	92	16.332.757	94	17.966.033	96	19.762.636			
3) Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran aparatur	%	90	90	413.708	90	230.600	92	732.200	94	805.420	96	885.962	98	974.558			
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian aparatur berkompeten	%	90	90	430.323	92	655.314	94	409.966	96	450.963	98	496.059	100	545.665			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau *indikator capaian* yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh setiap OPD di Kabupaten Klaten diarahkan untuk mewujudkan semua Misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten.

Pencapaian kinerja kepala daerah terukur pada Indikator Utama Daerah dan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya termasuk pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, terukur pada Indikator Kinerja Kunci. Penjabaran secara terinci jenis dan macam Indikator Kinerja Utama disampaikan pada tabel 8.1., sedangkan penetapan Indikator Kinerja Daerah yang terkelompok didalam aspek dan fokus, tertuang didalam tabel 8.2.

**TABEL 8.1. : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KLATEN**

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00
2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
3	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14
4	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69	10,15	10,13	10,11	10,09	10,07
5	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61
6	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7
7	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
9	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89
10	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36
11	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%
13	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100
14	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3
15	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)
16	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1
17	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	75	80	80	80

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
19	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6
20	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25
21	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38
22	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)								
	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50
	PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55
23	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08
24	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69
25	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2
26	Indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81
27	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46
28	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46
29	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80
30	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100
31	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37
32	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078
33	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00

**TABEL 8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KLATEN**

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
	Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13	12,9	12,9
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410	21.410	22.460	23.560	24.720	24.720	24.720
b. Fokus Kesejahteraan Sosial										
1) Urusan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08	1,08
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69	69
	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00	87,30	87,60	87,90	88,20	88,20	88,20
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	60,37
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
3) Urusan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	91,71	92	92,25	92,5	92,75	93	93,25	93,25
	Produksi daging sapi	(ton)	2.140	2.289	2.450	2.621	2.805	3.001	3.211	3.211
4) Urusan Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan	(ton)	27.831	28.660	29.515	30.396	31.302	31.467	31.467	31.467
	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/ tahun)	13	15,14	17,2	18,72	19,91	20,41	20,41	20,41
5) Urusan Transmigrasi	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga										
1) Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	60
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	5	5	5	5	5	30
2) Urusan Kebudayaan	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	6	6	6	6	6	36
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10	10	10	10	10	10	60

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. ASPEK PELAYANAN UMUM											
a. Fokus Pelayanan Dasar											
1) Urusan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00	55,00	55,00
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
2) Urusan Kesehatan	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14	14	14
	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61	1,61
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7	0,7	0,7
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
3) Urusan PUPR	Indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81	40,81	40,81
	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	78,94	78,98	79,20	79,60	80,00	80,00	80,00
4) Urusan Perwaskim	Prosentase Rumah Layak Huni	%	92,58	93,82	95,05	96,29	97,53	98,76	100,00	100	100
	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,78	10	0,39	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5) Urusan Trantibum dan Linmas	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100	100
	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
6) Urusan Sosial	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89	89	89
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92	94	96	97	99	100	100	100
	Persentase penduduk miskin	%	14,89	14,46	14,15	14,12	14,1	14,05	14,00	14,00	14,00
b. Fokus Pelayanan Penunjang											
1) Urusan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46	40,46	40,46
	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46	84,46	84,46
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03	43,93	48,82	53,71	56,16	58,60	58,60	58,60
2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh
3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%	100%	100%
	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%	27%	35%	42%	50%	58%	58%	58%

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%	33%	49%	66%	83%	100%	100%
4) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
5) Urusan Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	32,2	32,2	52,2	52,2	53,6	55,08	56,5	56,5
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan desa	%	15	30	46	61,5	73	84,6	100	100
	Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-government	%	10	10	14	40	60	80	100	100
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor	-	-	-	54	60	65	70	70
6) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5	7	9	11	13	15	15
7) Urusan Statistik	Dokumen data statistik	dokumen	1	1	1	4	4	4	4	4
8) Urusan Persandian	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
9) Urusan Perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4	5	5	5	5	5	5
10) Urusan Arsip	Prosentase kenaikan OPD mengelola arsip secara baku	%	5	5	5	5	5	5	5	25
11) Urusan Perencanaan	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
12) Urusan Keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13) Urusan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3	3
	Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2	3	3	3	3	3
	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)	70 (BB)
14) Fungsi Lainnya	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70	70	95	95	95	95	95
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,1
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0		100	100	100	100	100	100
	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	90	90	95	95	95	95
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah										
1) Urusan Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25	130
2) Urusan Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6	12,6
b. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur										
1) Urusan Perhubungan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92	40,76	45,87	47,41	57,52	57,52	57,52
	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078	81,078
c. Fokus Iklim Berinvestasi										
1) Urusan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja									
	PMDN		189	238	397	417	438	460	483	2.433
	PMA		46	294	294	294	294	294	294	1.764
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)									
	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	12,74
	PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	14,70
	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00	80,01
2) Urusan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38	19,38
3) Urusan Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2	35,2
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50
d. Fokus Sumberdaya Manusia										
1) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
2) Urusan Penelitian dan Pengembangan	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100,00	100,00

BAB IX PENUTUP

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten disusun sebagai penajaman penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam program-program pembangunan selama 3 tahun kedepan atau sampai periode tahun 2021. Penyusunannya diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, penerahan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta Indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI